



**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PERBANKAN**
(Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2011)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang

PERPLUKAAN
Oleh
Bambang Listyo Purno
NIM 7211409019

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Mei 2013

Pembimbing I



Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si.
NIP. 197510101999031001

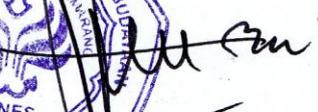
Pembimbing II



Dhini Suryandari, SE., M.Si., Ak.
NIP. 198212142008122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi




Drs. Fachrurrozie, M.Si.
NIP. 196206231989011001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Juli 2013

Penguji



Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si.
NIP. 195004161975011001

Anggota I



Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si.
NIP. 197510101999031001

Anggota II



Dhini Suryandari, SE., M.Si., Ak.
NIP. 198212142008122001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

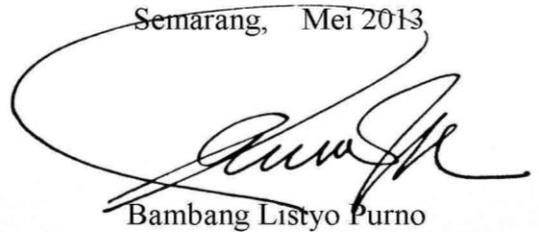


S. Martono, M.Si.
NIP. 196603081989011001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Mei 2013



Bambang Listyo Purno

7211409019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ❖ *Hanya kepadaMu (Allah) aku menyembah dan hanya kepadaMu (Allah) aku meminta pertolongan. (Q.S Al fatihah:5). Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. (HR. Muslim)*
- ❖ *Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. (Bung Karno). Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. (Mario Teguh).*
- ❖ *Saya meminta kekuatan, dan Allah memberi saya kesulitan untuk membuat saya kuat. Saya bertanya tentang kebijaksanaan, dan Allah memberi saya masalah untuk diselesaikan. Saya meminta untuk kemakmuran, dan Allah memberi saya tenaga untuk bekerja. Saya meminta keberanian, dan Allah memberi saya bahaya untuk diatasi. Saya meminta cinta, dan Allah memberi saya orang-orang yg bermasalah untuk dibantu. Saya meminta nikmat, dan Dia memberi saya peluang. Saya tidak meminta apa-apa untuk diri saya, tetapi saya menerima semua apa yang saya butuhkan. (Salahuddin Al-Ayubi).*

Persembahan :

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ *Almamaterku dan Segenap Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah berjasa dalam mendidik dan membimbing.*
- ❖ *Bapakku Parmo, ibuku Sunarmi, kakakku Siti Mursidah dan adikku Ervin Tri Noviyanti tersayang serta eyang putriku Manirah, dan keluarga besar Bapak Kyai Jasmani serta kekasihku tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkahku, terima kasih atas segala doa, pengorbanan dan kasih sayang kalian.*
- ❖ *Sahabat-sahabat, teman seperjuangan Akuntansi S1 A 2009, Keluarga Kos Pak Julaini, teman-teman PKL, Keluarga KKN Jlegong yang senantiasa saling memberikan support luar biasa dengan kebersamaan kita.*

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perbankan” dengan baik. Segenap usaha dan kerja penulis tidak mungkin membuahkan hasil tanpa kehendak-Nya. Segala halangan dan rintangan tidak akan mampu dilalui tanpa jalan terang yang ditunjukkan dan digariskan-Nya.

Penyusunan skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Penulisan Skripsi ini tidak lepas dari segala kendala dan kesulitan bila tanpa bimbingan, dorongan, saran dan kritik dan bantuan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas serta kesempatan untuk menimba ilmu dan pengetahuan di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. S. Martono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana demi kelancaran proses penelitian skripsi ini sampai selesai.

3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana demi kelancaran proses penelitian skripsi ini sampai selesai.
4. Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si., Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing, mengarahkan dan memberi sumbangan pemikiran selama penulisan hingga selesai skripsi ini.
5. Dhini Suryandari, SE., M.Si., Ak., Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing, mengarahkan dan memberi sumbangan pemikiran selama penulisan hingga selesai skripsi ini.
6. Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si., Dosen wali yang selalu membimbing dan memberikan arahan selama masa perkuliahan.
7. Akuntansi A UNNES 2009, teman-teman PKL Johan Nazwar A.R, Nirawan Adiasa, Saifudin Darmawan dan keluarga kos Pak Julaini, Indra Gunawan, Miftahul Risky, Ahmad Soleh, keluarga KKN Jlegong Aditya Restu W., Ellyza Uliya, Sri Roikah dan Vira N. serta teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Almamaterku dan Segenap Dosen Jurusan Akuntansi dan Pegawai Karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi UNNES serta semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis

Bambang Listyo Purno

SARI

Purno, Bambang Listyo. 2013. “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perbankan 2009-2011”. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si., II. Dhini Suryandari, SE., M.Si., Ak.

Kata Kunci : Kinerja Perbankan, *Good Corporate Governance*, Kepemilikan Instistusi, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, Komite Audit

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* yang terdiri dari kepemilikan instistusi, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi, komite audit terhadap kinerja perbankan baik secara simultan maupun parsial selama tahun 2009 sampai 2011. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* diperoleh 24 Bank pada setiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa *annual report* 24 Bank yang *listing* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 sampai 2011. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan regresi linier berganda dengan α 0,05, uji t, uji F, dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel mekanisme *Good Corporate Governance* yang terdiri dari kepemilikan instistusi, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi, komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan (ROA) ($0,002 < 0,05$). Namun secara parsial, hanya kepemilikan instistusi dan ukuran dewan direksi yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan. Kepemilikan instistusi signifikan berpengaruh terhadap kinerja perbankan ($0,028 < 0,05$). Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan ($0,946 > 0,05$). Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan ($0,552 > 0,05$). Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan ($0,483 > 0,05$). Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan ($0,002 < 0,05$). Sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan ($0,412 > 0,05$).

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini yaitu proporsi anggota dewan komisaris independen dalam perusahaan harus proporsional yaitu minimal 50% dari jumlah anggota dewan komisaris. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel kontrol, misalnya ukuran perusahaan selain itu juga bisa menggunakan alat ukur lain dalam mengukur kinerja perusahaan semisal ROI, ROE, dan sebaiknya menggunakan periode penelitian yang berbeda karena telah disahkan peraturan baru yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8 /PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dengan proporsi 4:3:2

ABSTRACT

Purno, Bambang Listyo. 2013. *Effect of Good Corporate Governance's Mecanism to Banking Performance Period 2009-2011.* Undergraduate thesis. Accounting Departement. Faculty of Economics. State University of Semarang. Advisor Dr.Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si., Co Advisor. Dhini Suryandari, SE., M.Si., Ak.

Keywords : Banking Performance, Good Corporate Governance, Institusional Ownership, Manajerial Ownership, Board Of Commisioners, Board Of Independent, Board Of Directors, Audit Commitee

The study aimed to analyze the influence of Good Corporate Governance's mecanism that consist of institusional ownership, manajerial ownership, board of commisioners, board of independent, board of directors, audit commitee to Banking Performance in the period 2009-2011 either simultaneously or partially. The population in this study is the Banks listed on the Indonesia Stock Exchange. Sampling was done by purposive sampling method that gotten 24 Banks in each period. This study uses secondary data that are 24 annual reports of the Banks listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2009-2011. The testing of hypothesis in this study uses descriptive analysis, classical assumptions, regresion analysis with α 0,05, t test, F test, and coefficient of determination.

The result of this study showed that the mechanism variable of Good Corporate Governance simultaneously consist of institusional ownership, manajerial ownership, board of commisioners, board of independent, board of directors, audit commitee, effect significantly to banking performance ($0,002 < 0,05$). But in partial, just institutional ownership variable and board of directors which influence significantly to banking performance. Institutional ownership signifcantly influence to banking performance ($0,028 > 0,05$). Managerial ownership doesn't significantly influence to banking performance ($0,946 > 0,05$). Board of commisioners doesn't significantly influence banking performance ($0,552 > 0,05$). Board of independent doesn't significantly influence banking performance ($0,483 > 0,05$). Board of directors significantly influence banking performance ($0,002 < 0,05$). Whereas audit committee doesn't significantly influence banking performance ($0,412 > 0,05$).

Advice can be given in this study is the proportion of independent board members in a company should be proportionate ie at least 50% of the members of the board of commissioners. For further research are expected to use a control variables, such as firm size but it can also use other measuring tools in measuring the performance of companies such as ROI, ROE, and should use a different period of the study because it has passed a new regulation that Peraturan Bank Indonesia No. 14/8 / PBI / 2012 dated July 13, 2012 about Shareholding Commercial Banks with the proportion of shares to financial institutions, not financial institutions and individuals respectively 4:3:2

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Kegunaan Penelitian.....	15
1. Kegunaan Teoritis.....	15
2. Kegunaan Praktis	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	16
2.2. <i>Good Corporate Governance</i>	19
2.2.1. Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	22
2.2.2. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	26
2.2.3. Pilar Pendukung <i>Good Corporate Governance</i>	28
2.2.4. Manfaat dan Tujuan <i>Good Corporate Governance</i>	29
2.3. Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i>	31
2.3.1. Mekanisme Pemantauan Kepemilikan.....	32
2.3.2. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal	35

2.3.3. Mekanisme Pemantauan Pengungkapan.....	43
2.4. Kinerja Perbankan	44
2.5. Penelitian Terdahulu.....	49
2.6. Kerangka Pemikiran	54
2.6.1. Hubungan Mekanisme <i>GCG</i> terhadap Kinerja Perbankan	54
2.6.2. Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perbankan ...	56
2.6.3. Hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perbankan	58
2.6.4. Hubungan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja Perbankan...59	
2.6.5. Hubungan Ukuran Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Perbankan.....	60
2.6.6. Hubungan Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Perbankan	63
2.6.7. Hubungan Komite Audit terhadap Kinerja Perbankan	63
2.7 Pengembangan Hipotesis	65
2.8 Model Penelitian.....	66

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian	67
3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	67
3.2.1 Populasi.....	67
3.2.2 Sampel.....	69
3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel	69
3.3 Variabel Penelitian	71
3.3.1 Variabel Dependen.....	71
3.3.2 Variabel Independen	72
3.3.3 Kriteria Data.....	76
3.4 Metode Pengumpulan Data	79
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data	79
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	78
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	79
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	80
3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas.....	81
3.5.2.3 Uji Autokorelasi.....	81

3.5.2.4 Uji Multikolinearitas.....	82
3.5.3 Analisis Regresi Berganda.....	83
3.5.4 Uji Koefisien determinasi (R^2).....	84
3.5.5 Uji Statistik F.....	84
3.5.6 Uji Statistik t.....	85
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	86
4.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	88
4.3 Analisis Uji Asumsi Klasik.....	91
4.3.1 Uji Normalitas.....	91
4.3.2 Uji Heteroskedastisitas.....	95
4.3.3 Uji Autokorelasi.....	97
4.3.4 Uji Multikolinieritas.....	98
4.4 Analisis Regresi Berganda.....	99
4.4.1 Koefisien Determinan (R^2).....	99
4.4.2 Uji Statistik F (Simultan).....	100
4.4.3 Uji Statistik t (Parsial).....	101
4.5 Pembahasan	
4.5.1 Analisis Deskripsi Variabel penelitian.....	106
4.5.2 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	109
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	115
5.2 Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN.....	126

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	52
3.1. Populasi penelitian	68
3.2. Sampel Penelitian.....	70
3.3. Definisi Operasional dan Cara Pengukuran Variabel	75
3.4. Kriteria Variabel ROA	76
3.5. Kriteria Variabel Kepemilikan Institusional	76
3.6. Kriteria Variabel Kepemilikan Manajerial.....	77
3.7. Kriteria Variabel Ukuran Dewan Komisaris.....	77
3.8. Kriteria Variabel Ukuran Komisaris Independen	78
3.9. Kriteria Variabel Ukuran Dewan Direksi	78
3.10. Kriteria variabel Ukuran Komite Audit	78
4.1. Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian	86
4.2. Daftar Perusahaan yang menjadi Sampel Penelitian Periode 2009-2011	87
4.3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	88
4.4. Hasil Uji <i>Kolmogorov Smirnov</i>	94
4.5. Hasil Uji <i>Glejser</i>	96
4.6. Hasil Uji Autokorelasi	97
4.7. Hasil Uji Multikolinearitas.....	98
4.8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	99
4.9. Hasil Uji Statistik F (Simultan).....	100
4.10. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t).....	101
4.11. Hasil Pengujian Hipotesis Keseluruhan	106

GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis	66
4.1. <i>Histogram</i>	92
4.2. Grafik <i>Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual</i>	93
4.3. <i>Scatterplot</i>	95



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar ROA Perusahaan Perbankan tahun 2009 - 2010.....	127
2. Daftar Presentase Kepemilikan Instiusional Perusahaan Perbankan	128
3. Daftar Presentase Kepemilikan Manjerial Perusahaan Perbankan	129
4. Daftar Ukuran Dewan Komisaris Perusahaan Perbankan.....	130
5. Daftar Presentase Komisaris Independen Perusahaan Perbankan	131
6. Daftar Ukuran Dewan Direksi Perusahaan Perbankan	132
7. Daftar Presentase Komite Audit Perusahaan Perbankan	133
8. Daftar Pemegang Saham Perusahaan Perbankan.....	134
9. Tabel Analisis Statistik Deskriptif	145
10. Histogram	146
11. <i>Gambar uji P-Plot of Regression Standardized Residual</i>	147
12. Tabel Uji <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	147
13. <i>Gambar Analisis Scatterplot</i>	148
14. Tabel Uji <i>Glesjer</i>	148
15. Tabel Uji <i>Durbin Watson</i>	149
16. Tabel Uji Multikolonieritas.....	149
17. Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	149
18. Tabel Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)	150
19. Tabel Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t).....	150



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan dalam berbagai bidang sosial, budaya, politik dan ekonomi. Perubahan kondisi perekonomian global yang terjadi di berbagai negara juga memiliki dampak bagi negara Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dalam setiap sektor perekonomian di Indonesia agar dapat menjaga ketahanan dan kelangsungan setiap usaha bisnis demi meningkatkan perekonomian nasional sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lain.

Sebagai sebuah konsep, *Good Corporate Governance* ternyata tidak memiliki definisi tunggal. Menurut Komite Cadbury, *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholder* pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Sejalan dengan itu menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan bahwa *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang

kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Darmawati dkk, 2004).

Menurut Bank Indonesia keadaan perbankan di Indonesia mengalami pasang surut. Bank Indonesia menilai kasus kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia karena lemahnya penerapan GCG di bank tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan lemahnya pengawasan internal bank dan pengawasan dari manajemen tertinggi (*top management*) bank (media indonesia.com). Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh dewan komisaris dan auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang *fair*. Lemahnya penerapan *corporate governance* inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan.

Selain itu, dalam seminar "*Good Corporate Governance di Perbankan*," di Ballroom Hotel Nikko, sebagaimana yang termuat di dalam media indonesia.com,

Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah mengatakan bahwa kasus operasional yang terjadi di Indonesia berdasarkan pemeriksaan BI yaitu karena lemahnya *top management* dalam melakukan *review* secara berkala terhadap kebijakan SOP dan pengendalian internal. Kurang optimalnya pengawasan tersebut dibarengi dengan lemahnya implementasi kebijakan sistem dan prosedur serta Sumber Daya Manusia yang kurang menjalankan prinsip *Know Your Employee*. Menyangkut pengendalian internal, meskipun sistem aktif sudah berjalan tapi pelaksanaan hal-hal mendasar belum dilakukan secara reguler. Apalagi banyak bank yang menganggap GCG lebih sebagai biaya dan menghambat ekspansi usahanya.

Berkaitan dengan pembenahan intern perbankan sebagai bagian dari upaya pengembangan industri perbankan, penerapan prinsip-prinsip GCG diyakini akan memberikan landasan yang kokoh bagi praktik-praktik usaha yang hati-hati dan profesional. Penerapan prinsip-prinsip GCG memungkinkan terjadinya *self regulatory* yang mengendalikan perilaku manajemen dan semua karyawan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip profesionalisme, etika bisnis, akuntabilitas, dan transparansi. Contohnya kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia mirip dengan kasus *fraud* terkenal seperti Barings Bank di Singapura. Kasus Barings Bank itu terjadi karena tidak adanya pembagian tanggung jawab yang merata, lemahnya pengendalian internal dan kurangnya pengawasan *top management*. Seperti diketahui, kejahatan perbankan yang baru-baru saja terjadi di Citibank dan Bank Mega terjadi karena terlalu besarnya kewenangan yang dilakukan oleh seorang pejabat bank, seperti yang dilakukan *Relationship Manager* Citibank dan Kepala

Cabang Bank Mega di Jababeka. Mereka menjadi dalang pembobolan dana nasabahnya hingga ratusan miliar.

Sementara itu, Jos Luhukay seorang pengamat perbankan *Strategic Indonesia*, mengatakan bahwa modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan (*fraud*), tetapi lemahnya pengawasan *internal control* bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan. *Internal control* menjadi masalah utama perbankan. Bank Indonesia harus mengatur *Standard Operating Procedure (SOP)* (Kompas.com Selasa,3/5/2011).

Strategic Indonesia mencatat, dalam kuartal I 2011 telah terjadi sembilan kasus pembobolan bank di berbagai industri perbankan. Berikut adalah sembilan kasus perbankan pada kuartal pertama yang dihimpun oleh *Strategic Indonesia* melalui Badan Reserse Kriminal Mabes Polri:

1. Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square. Kasus ini melibatkan *supervisor* kantor kas tersebut dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya, membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS.
2. Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011. Kasus ini melibatkan *account officer* BII Cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp 3,6 miliar.
3. Pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri. Kasus ini melibatkan lima tersangka, salah satunya *customer service*

bank tersebut. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011, dengan nilai kerugian Rp 18 miliar.

4. Kasus Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Tersangka seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka mengirim berita *teleks* palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal kerja.
5. Pencairan deposito Rp 6 miliar milik nasabah oleh pengurus BPR tanpa sepengetahuan pemiliknya di BPR Pundi Artha Sejahtera, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak ada dana. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan seorang pelaku dari luar bank.
6. Pada 9 Maret terjadi pada Bank Danamon. Modusnya *head teller* Bank Danamon Cabang Menara menarik uang kas nasabah berulang-ulang sebesar Rp 1,9 miliar dan 110.000 dollar AS.
7. Penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan dana ke rekening pribadi. Kerugian bank Rp 2,5 miliar.
8. Pembobolan uang nasabah prioritas Citibank *Landmark* senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan senior *Relationship Manager* (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah.

9. Konspirasi kecurangan investasi atau deposito senilai Rp 111 miliar untuk kepentingan pribadi Kepala Cabang Bank Mega Jababeka dan Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk.

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 Menurut Budiarti (2010) bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya GCG dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha untuk mengembalikan kepercayaan terhadap dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu: ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan GCG dan pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank. Pelaksanaan GCG sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat.

Penelitian mengenai *corporate governance* banyak dilakukan seiring dengan terbukanya skandal keuangan di dunia. Perhatian terhadap *corporate governance* terutama juga dipicu oleh skandal spektakuler seperti, Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwell, dan lain-lain. Keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktik curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh *corporate boards* (Kaihatu, 2006).

Menurut Raffles (2011) berdasarkan hasil penyelidikan para regulator pemerintah dan analisis para pakar manajemen dapat disimpulkan penyebab

utama tumbangya perusahaan-perusahaan besar itu adalah karena lemahnya penerapan prinsip-prinsip *GCG* mereka, di samping itu makin terpisahnya hubungan pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Kelemahan prinsip *GCG* itu antara lain ditandai oleh empat macam hal, yaitu:

1. lemahnya peranan the *board of directors* dalam mengendalikan pengelolaan perusahaan; *Board of directors* kurang aktif dalam menganalisis strategis bisnis perusahaan,
2. semakin bebasnya manajemen perusahaan mengelola harta dan utang perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan penting yang bersangkutan dengan kelangsungan hidup perusahaan,
3. tidak transparan, akurat dan tepat waktunya pengungkapan laporan perkembangan bisnis dan keuangan oleh *board of directors* kepada pemegang saham dan kreditur,
4. dalam banyak kasus auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tidak bekerja dibawah pengawas langsung komite audit dan tidak bebas dari pengaruh manajemen senior perusahaan.

Pada dasarnya isu tentang *corporate governance* dilatarbelakangi oleh *agency theory* yang menyatakan munculnya masalah *agency* dikarenakan pengelolaan suatu perusahaan yang terpisah dari kepemilikannya. Dengan dipisahkannya kepemilikan dari pengelolaan perusahaan menimbulkan masalah *agency*. Pemilik sebagai pemilik modal perusahaan mendelegasikan wewenangnya atas pengelolaan perusahaan kepada agen. Akibatnya, kewenangan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya berada di

tangan agen atau manager. Hal itu menimbulkan kemungkinan terjadinya *moral hazard* dimana manajemen tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*).

Berkaitan dengan masalah *agency, corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada *agency theory*, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa manager akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manager tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manager (Shleifer dan Vishny, 1997, dalam Darmawati dkk, 2004).

Manajer dengan informasi yang dimilikinya bisa saja bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik karena manager memiliki informasi perusahaan yang tidak dimiliki pemilik (*asymmetry information*). Hal ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan menghilangkan kepercayaan investor terhadap pengembalian (*return*) atas investasi yang telah mereka tanam pada perusahaan tersebut. Jika manajemen terpisah dari pemilik, akan memunculkan permasalahan tentang bagaimana pemegang saham dapat secara efektif memonitor pengurusan perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Untuk itu dilahirkan lembaga Komisaris, partisipasi pemegang

saham melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), peran menentukan kompensasi Direksi yang dikaitkan dengan kinerja, perlindungan hukum, transparansi, dan kewajiban *disclosure*, termasuk hak pemegang saham minoritas.

Pencapaian tujuan dan kinerja bank tidak terlepas dari manajemen itu sendiri. Sehubungan dengan hal ini, hubungan antara manajemen suatu bank dengan pemilik bank akan dituangkan dalam suatu kontrak (*performance contract*). Hubungan kontrak pemilik dan manajemen tersebut sejalan dengan *agency theory*. Maka untuk mengatasi permasalahan *agency*, pihak perbankan perlu melakukan pembenahan terhadap sistem tata kelola perusahaan. Untuk mencapai *good corporate governance* dibutuhkan suatu mekanisme yang tersistem untuk memantau terhadap seluruh kebijakan yang diambil. Mekanisme GCG merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut (Walsd dan Seward, 1990 dalam Arifin, 2005).

Diakui ataupun tidak, penerapan GCG di Indonesia merupakan hal yang sangat vital, karena dapat membantu perusahaan keluar dari krisis ekonomi dan bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang harus menghadapi arus globalisasi, mengikuti perkembangan perekonomian global dan pasar dunia yang semakin kompetitif. Penerapan GCG dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat memburuk, melindungi kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka memberikan

pencitraan manajemen perbankan yang sehat. Selain itu penerapan GCG di dalam perbankan diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan GCG ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang *oportunistic* atau cenderung menguntungkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer.

Dengan demikian sebenarnya penerapan GCG bukan hanya berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan pemiliknya (*shareholders*) namun juga berhubungan dengan para pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*). Penerapan GCG di dalam segala aktivitas perusahaan diharapkan dapat mengatasi konflik keagenan yang selama ini terjadi. Sehingga agen atau manajer dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa membuat kecurangan yang mampu merugikan pihak prinsipal atau pemilik perusahaan.

Untuk itu maka perlu dilakukan pengawasan dalam manajemen perbankan. Pengawasan merupakan bagian tak bisa dipisahkan dari proses manajemen perusahaan. Mengawasi berarti melihat dan memperhatikan apakah yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan

mekanisme internal, seperti pengendalian perusahaan dan mekanisme pasar (Iskandar & Chamlaio, 2000 dalam Lastanti, 2004).

Dalam penelitian ini lebih banyak mengkaji secara mendalam mekanisme *good corporate governance* mengenai Mekanisme Pemantauan Kepemilikan meliputi Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal meliputi Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Ukuran Dewan Direksi. Mekanisme Pemantauan Pengungkapan meliputi pengungkapan yang dilakukan oleh Komite Audit. Kepemilikan institusional yang besar akan mengakibatkan kontrol eksternal yang lebih besar di dalam suatu perusahaan. Selain itu kepemilikan mayoritas bisa saja mengabaikan kepentingan pemilik saham minoritas sehingga dalam pengambilan keputusan pemegang saham mayoritas lebih dominan dan unggul. Kepemilikan manajerial yang besar akan menurunkan keintegritasan laporan keuangan dan berdampak pula pada menurunnya kinerja perusahaan. Hal ini karena manusia pada umumnya memiliki sifat *self interest* sehingga manajer ingin menampilkan laporan keuangan yang sebaik-baiknya di depan *stakeholders* agar kinerja perusahaan disini terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya.

Ukuran dewan komisaris yang besar menyebabkan monitoring manajemen semakin baik. Hal ini karena jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dalam hal pengawasan. Sedangkan jumlah dewan direksi yang banyak akan meningkatkan kinerja perbankan. Hal ini dikarenakan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya.

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya. Ketika komite audit menjalankan tugasnya dengan baik maka tugas pengawasan menjadi lebih baik sehingga kinerja perbankan meningkat.

Hasil penelitian Arbaina (2012) membuktikan bahwa penerapan *good corporate governance* pada perbankan di Indonesia berjalan kurang maksimal. Terdapat beberapa faktor yang mendorong tidak diterapkan *good corporate governance* pada perbankan di Indonesia secara maksimal, seperti pelaksanaan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran, serta independensi tidak sepenuhnya diterapkan pada perbankan di Indonesia. Klapper dan Love (2002) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA) dan *Tobin's Q*. Sejalan dengan itu Darmawati, dkk (2004) dan Nuswandari (2009) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE. Sejalan dengan itu, hasil penelitian Amyulianthy (2012) membuktikan bahwa *corporate governance* diproksikan dengan kepemilikan manajerial, ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan proksi *Tobin's Q*.

Sementara itu, Sayidah (2007) menemukan bukti bahwa bahwa kualitas *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan. Hal senada diungkapkan oleh Puspitasari dan Ernawati (2010) membuktikan

bahwa *Corporate governance* yang terdiri dari (kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan konsentrasi kepemilikan) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *ROA*, *ROE*, *PER* dan *Tobins'Q*

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Dalam penelitian ini konsep indikator yang dipakai dalam mekanisme *corporate governance* terdiri Mekanisme Pemantauan Kepemilikan meliputi Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal meliputi Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Ukuran Dewan Direksi. Mekanisme Pemantauan Pengungkapan meliputi pengungkapan yang dilakukan oleh Komite Audit terhadap kinerja yang dilakukan oleh industri perbankan di Indonesia. Dalam mengukur kinerja menggunakan *ROA* sebagai indikator kinerja perbankan. *ROA* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan operasi dengan total aktiva yang ada.

Mekanisme *GCG* diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan menjembatani konflik keagenan yang selama ini terjadi. Hal ini memungkinkan terjadinya peningkatan kepercayaan investor dan kreditor untuk melakukan investasi pada perusahaan dengan harapan perusahaan akan memberikan *return* maksimal dari modal yang ditanamkan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perbankan”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah:

1. Apakah mekanisme *good corporate governance* secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan?
4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan?
6. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan?
7. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu untuk :

1. Menguji pengaruh mekanisme *good corporate governance* secara simultan terhadap kinerja perbankan.
2. Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perbankan.
3. Menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perbankan.

4. Menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perbankan.
5. Menguji pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perbankan.
6. Menguji pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja perbankan.
7. Menguji pengaruh komite audit terhadap kinerja perbankan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi dalam mengembangkan penelitian di waktu yang akan datang, serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi khususnya di bidang akuntansi yang berkaitan dengan *good corporate governance*.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Manajemen Institusi

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dalam mengelola perusahaan.

b) Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi khususnya dalam menilai kinerja suatu bank.

c) Bagi Peneliti/Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana bagi pembaca tentang *good corporate governance* maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Dalam mengkaitkan antara struktur kepemilikan dengan kinerja bank, terdapat satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian sasaran organisasi bank serta kinerjanya, yaitu pihak manajemen atau pengurus bank (Dewayanto, 2010). Pencapaian tujuan dan kinerja bank tidak terlepas dari kinerja manajemen itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, hubungan antara manajemen suatu bank dengan pemilik bank akan dituangkan dalam suatu kontrak (*performance contract*). Hubungan kontrak antara pemilik dan manajemen tersebut sejalan dengan *Agency Theory* (Jensen dan Meckling, 1976). Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajer.

Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengendalian perusahaan semakin dipisahkan dari kepemilikan. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menunjukkan pentingnya pemisahan antara manajemen perusahaan dengan pemilik. Tujuan dari sistem pemisahan ini adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dengan mempekerjakan agen profesional dalam mengelola perusahaan. Hal ini terjadi di mana CEO perusahaan memiliki tanggung jawab untuk bertindak sebagai agen untuk pemilik. Sementara pemilik berusaha untuk memperoleh

informasi (dengan evaluasi), mengembangkan sistem insentif untuk memastikan tindakan yang dilakukan agen untuk kepentingan pemilik (FCGI).

Kenyataannya ada masalah dalam pemisahan manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan. Manajer mungkin berusaha untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan kepentingan para pemegang saham. Selanjutnya pemisahan ini dapat menyebabkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana dalam perusahaan dan dalam keseimbangan yang tepat dari kepentingan, misalnya, pemegang saham dan manajer dan pengendalian dan pemegang saham minoritas.

Dalam perspektif *Agency Theory*, agen (manajer) mempunyai kewenangan untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan. Masalah keagenan muncul akibat adanya konflik kepentingan antara agen dengan *principal* yang ingin memperoleh *return* maksimal. Manajer seharusnya mengelola perusahaan dengan baik agar kepentingan *principal* menjadi optimal, namun kenyataannya cmanajer lebih mengedepankan kepentingannya sendiri yang sering disebut dengan tindakan *moral hazard*. Tindakan *moral hazard* sangat mungkin terjadi karena adanya asimetri informasi. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada manajer untuk memberikan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya.

Ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan (Darmawati, dkk,2005) yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi

1. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional (*bounded rationality*) dan tidak menyukai resiko
2. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*
3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai komoditi yang dapat dijualbelikan

Berkaitan dengan masalah *agency*, *corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori *agency* diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. *Corporate governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas (Sari, 2010). Sejalan dengan ini Che Haat, et al (2008) juga berpendapat bahwa untuk mengatasi konflik keagenan, dibutuhkan pedoman yang lebih baik yaitu dengan adanya mekanisme *GCG* sehingga konflik keagenan yang selama ini terjadi bisa berkurang. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang

memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Dermawati, dkk, 2004).

2.2 Good Corporate Governance

Sebagai sebuah konsep, *Good Corporate Governance* tidak hanya memiliki definisi tunggal. Pada tahun 1992, Komite Cadbury melalui *Cadbury Report*, mengeluarkan definisi tentang *Good Corporate Governance*. Menurut Komite Cadbury, *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholder* pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Corporate governance adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan, dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan *stakeholders* dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan, dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditor dan calon

kreditor perseroan. *Corporate governance* adalah suatu konsep yang luas. (Sutan Remy Sjahdeini, 1999:1)

Ada berbagai pengertian *Good Corporate Governance* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. (IICG)
- b. *Corporate governance* merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. (OECD)
- c. *Good corporate governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). (PBI nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum)

Isu *corporate governance* muncul karena berkembangnya bentuk perseroan, terutama karena perseroan itu *go public* sehingga pemilik perusahaan umumnya tidak menjadi pengelola atau manajemen perusahaan sendiri. Dalam kondisi seperti itu akan muncul masalah keagenan. Namun, dengan adanya *corporate governance* maka manajemen akan selalu bertindak ke dalam rangka kepentingan pemilik perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Selain itu perusahaan semakin bergantung pada modal eksternal

(ekuitas, pinjaman) untuk pembiayaan kegiatan mereka, investasi dan pertumbuhan. Oleh karena itu perusahaan perlu meyakinkan investor bahwa modal yang mereka investasikan digunakan secara tepat dan efisien. Jaminan tersebut diberikan dengan adanya sistem tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Sebuah sistem tata kelola perusahaan harus memberikan perlindungan yang efektif bagi pemegang saham dan kreditur, sehingga mereka dapat meyakinkan diri untuk mendapatkan pengembalian atas investasi yang tepat. Hal ini karena perusahaan juga harus membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan efisien dan berkelanjutan dari sektor perusahaan.

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah *agency*. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi masalah *agency* antara pemilik dan manajer (Macey dan O'Hara, 2003). Masalah *agency* muncul dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer yaitu sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return*.

Sulistiyanto dan Wibisono (2003) mengemukakan bahwa *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi setiap *stakeholders*. Ada dua hal yang ditekankan dalam mekanisme ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham atau investor untuk memperoleh

informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Dalam buku (Brigham dan Erhardt, 2005), tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prosedur yang menjamin manajer untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis nilai. Lebih lanjut dalam buku tersebut menjelaskan Pentingnya bank ekonomi nasional digaris bawahi oleh kenyataan bahwa perbankan secara universal sebuah industri regulator dan bank memiliki akses ke jaring pengaman pemerintah. Ini sangat penting, oleh karena itu bank harus memiliki tata kelola perusahaan yang kuat

2.2.1 Prinsip *Good Corporate Governance*

Salah satu pilar penting dalam *good corporate governance* di perbankan adalah komitmen penuh dari seluruh jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Maka dari itu seluruh karyawan wajib untuk menjunjung tinggi prinsip *good corporate governance*. Prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, diantaranya: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness* (TARIF). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good corporate governance* seperti yang tercantum dalam penjelasan bankirnews.com dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki dana dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*).

Dengan keterbukaan informasi tersebut maka para *stakeholder* dapat menilai kinerja berikut mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, dapat menghasilkan terjadinya efisiensi atau disiplin pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam perusahaan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip *accountability* (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran). Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan di antara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan.

Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah kurang efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau bahkan sebaliknya, Komisaris mengambil alih peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi. Oleh karena itu diperlukan kejelasan mengenai tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme *checks and balances* kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Responsibility (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip *responsibilitas* ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

4. *Independency* (Kemandirian)

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. *Independensi* penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya *independensi* dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila ternyata harus mengorbankan kepentingan perusahaan yang seharusnya mendapat prioritas utama.

Untuk meningkatkan *independensi* dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek di tingkat pengurus bank, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh Undang-undang diberi amanat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak *stakeholder* berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa insider trading (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), fraud (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

2.2.2 Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Arbaina (2012) Keberhasilan penerapan *good corporate governance* juga memiliki prasyarat tersendiri. Terdapat dua faktor yang memegang peranan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal antara lain:

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *good corporate governance*, diantaranya:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan *good corporate governance* dari sektor publik atau lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good governance* dan *clean governance* yang sebenarnya.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan *good corporate governance* yang tepat (*best practices*) dapat menjadi standar pelaksanaan *good corporate governance* yang efektif dan professional. Dengan kata lain semacam *benchmark* (acuan).
- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *good corporate governance* di masyarakat. Ini penting karena melalui sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi *good corporate governance* secara sukarela.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi *good corporate governance* terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat

mempengaruhi kualitas dan *rating* perusahaan dalam implementasi *good corporate governance*.

2. Faktor Internal

Faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *good corporate governance*, diantaranya yaitu:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *good corporate governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *good corporate governance*.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *good corporate governance*.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.

Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2.2.3 Pilar Pendukung *Good Corporate Governance*

Good corporate governance dapat memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif, sehingga dapat tercipta mekanisme *checks and balance* di perusahaan. Penerapan *good corporate governance* perlu

didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* pada 17 Oktober 2006 prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah :

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan *good corporate governance* sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*sosial control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.

2.2.4 Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan *good corporate governance* diterbitkan adalah agar suatu perusahaan dapat dikelola dengan baik dan benar sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan baik *shareholders* maupun *stakeholders*.

Selain tujuan diberlakukannya *corporate governance* tersebut, penerapan *good corporate governance* juga akan memberikan manfaat, baik bagi perusahaan

itu sendiri maupun bagi para *stakeholders*. Setidak-tidaknya ada 4 (empat) manfaat praktis dalam penerapan *good corporate governance* menurut (Tjager et al. 2003:96) dalam Naja (2007:44) yaitu:

1. Untuk meminimalkan *agency cost*, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya perseroan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri.
2. Untuk meminimalkan *cost of capital*, yaitu biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur.
3. Untuk meningkatkan nilai saham perusahaan, dengan pengelolaan perusahaan tentu akan dapat menarik minat dan kepercayaan para investor sehingga sangat membantu usaha perseroan.
4. Untuk mengangkat citra perusahaan, dengan berhasilnya peningkatan harga saham maka akan menimbulkan *image* positif terhadap opini yang berkembang di masyarakat.

Sejalan dengan itu, *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) juga mengemukakan bahwa setidaknya ada 4 (empat) manfaat yang dapat diambil dari penerapan GCG yang baik, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders's value* dan deviden

2.3 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol/ pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Walsd dan Seward, 1990 dalam Arifin, 2005). Menurut Boediono (2005) mekanisme *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah *agency*. Maka untuk meminimalkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara efektif untuk mengatasi konflik kepentingan(*conflict of interest*) tersebut.

Menurut Iskandar & Chamlaio (2000) dalam Lastanti (2004), mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme *internal* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan

komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian perusahaan dan mekanisme pasar. Dalam penelitian Zulkafli dan Samad, 2007 (dikutip oleh Praptiningsih, 2009) mengkaji mengenai mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengukur kinerja perusahaan perbankan melalui Mekanisme Pemantauan Kepemilikan (*Ownership*), Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal dan Mekanisme Pemantauan Pengungkapan.

Dalam penelitian ini lebih banyak mengkaji secara mendalam mekanisme *good corporate governance* mengenai Mekanisme Pemantauan Kepemilikan meliputi Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal meliputi Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Ukuran Dewan Direksi. Mekanisme Pemantauan Pengungkapan meliputi pengungkapan yang dilakukan oleh Komite Audit.

2.3.1 Mekanisme Pemantauan Kepemilikan

Dalam Penelitian ini menggunakan struktur kepemilikan modal sebagai mekanisme pemantauan kepemilikan. Struktur kepemilikan terdiri dari struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

1. Kepemilikan Institusional

Ada beberapa pengertian kepemilikan manajerial yang diuraikan beberapa peneliti, yaitu menurut Wahidahwati (2002) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan presentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi perusahaan pada akhir tahun. Siregar dan Utama (2005) menyatakan bahwa

kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*). Faisal (2004) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan. Dengan kepemilikan yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuan untuk memonitor manajemen lebih besar.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh investor yang berasal dari pihak institusi perusahaan. Kepemilikan institusional diukur dengan skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan total saham perusahaan.

$$INST = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki investor institusi}}{\text{Total modal saham perusahaan yang beredar}}$$

Kepemilikan institusional di dalam suatu perusahaan mempunyai arti penting dalam memonitor manajemen dalam mengelola perusahaan. Dengan tingkat kepemilikan yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer. Semakin tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar suara dan dorongan institusi untuk melakukan pengawasan.

Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan

manajemen melakukan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan.

2. Kepemilikan Manajerial

Ada beberapa pengertian kepemilikan manajerial yang diuraikan beberapa peneliti, yaitu Lemons dan Lins (2001) dalam Arifin (2005) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat diartikan semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial akan menurunkan market value, penurunan ini akan diakibatkan karena tindakan oportunistik yang dilakukan oleh pemegang saham manajerial. Wahidahwati (2002) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen (direktur dan komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Susiana dan Herawaty (2007) menyatakan kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah kepemilikan pemegang saham dari manajemen yang terdiri

direktur dan komisaris yang diukur dengan menggunakan presentase jumlah saham manajemen terhadap jumlah seluruh saham yang beredar. Kepemilikan manajemen diukur menggunakan skala rasio melalui persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar.

$$MANJ = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen}}{\text{Total modal saham perusahaan yang beredar}}$$

Pada perusahaan tertentu untuk memotivasi kinerja manajer, mulai menerapkan strategi atau kebijakan kepemilikan manajerial. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan manajer tersebut bisa mengurangi adanya asimetri informasi di dalam suatu perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori agensi. Dengan demikian diharapkan dengan keterlibatan manajer pada kepemilikan saham dapat efektif meningkatkan kinerja manajer.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dan Morck et al. (1989) kepentingan manajer dan pemegang saham dapat diselaraskan bila manajer memiliki saham perusahaan yang lebih besar. Kualitas informasi yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial. Tekanan dari pasar modal menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan, yang sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi dari perusahaan yang bersangkutan.

2.3.2 Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal

Komposisi dewan merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi keuangan. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi

pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan keuangan yang berkualitas. Dalam penelitian ini, pemantauan terhadap terselenggaranya sistem pengendalian intern dalam rangka mewujudkan *good corporate governance* terdiri dari:

1. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Pembentukan dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk memonitor kinerja manajer. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, dewan komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan secara independen antara lain :

- a. Wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi.
- c. Dalam melakukan pengawasan, dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- d. Dewan komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor

eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

- e. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: Komite Audit; Komite Pemantau Risiko; Komite Remunerasi dan Nominasi.
- f. Wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
- g. Wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota dewan Komisaris.
- h. Wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
- i. Wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lain, anggota direksi dan/atau pemegang saham Bank.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut, dalam menegakkan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada bank, dewan komisaris juga memiliki larangan-larangan antara lain:

- a. Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali: (1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan (2) hal-hal lain yang

ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

- b. Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
- c. Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, jumlah anggota dewan komisaris pada perusahaan perbankan paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen. Ukuran dewan komisaris diukur berdasarkan seluruh jumlah anggota dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen.

2. Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Di Indonesia saat ini, keberadaan komisaris independen sudah diatur dalam *Code of Good Corporate Governance* (KNKCG). Komisaris menurut *Code*

tersebut, bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan memberikan nasihat bilamana diperlukan. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *Stakeholders* lainnya.

Kriteria yang harus dimiliki oleh komisaris independen menurut Surat Edaran BI No.9/12/DPNP adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki hubungan keuangan, yakni apabila memperoleh penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman dari anggota dewan komisaris lainnya dan/atau direksi (pengurus) Bank, dari perusahaan yang PSP nya pengurus Bank, dan dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank.
- b. Tidak memiliki hubungan kepengurusan, yakni apabila menjadi pengurus pada perusahaan dimana dewan komisaris Bank lainnya menjadi pengurus, menjadi pengurus pada perusahaan yang PSP nya pengurus Bank, dan menjadi pengurus atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan PSP Bank
- c. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham yakni apabila menjadi pemegang saham pada perusahaan yang PSP nya adalah pengurus dan/atau PSP Bank, dan/atau menjadi pemegang saham pada perusahaan PSP Bank
- d. Tidak memiliki hubungan dengan Bank apabila:
 1. memiliki saham Bank lebih dari 5% dari modal disetor bank
 2. menerima/memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjamandari/kepada Bank yang menyebabkan pihak yang memberi

bantuan, seperti pihak terafiliasi dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan dengan bank (debitor inti dan depositan inti).

3. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota dewan komisaris independen minimal 50% dari anggota dewan komisaris. Komisaris independen diukur dengan menggunakan skala rasio melalui presentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan (Isnanta, 2008 dalam Sari, 2010).

$$INDP = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris dari luar perusahaan}}{\text{seluruh anggota dewan komisaris perusahaan}}$$

3. Ukuran Dewan Direksi

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam rangka pemantauan terhadap pengendalian internal bank, direksi mempunyai tanggung jawab menetapkan kebijakan, strategi serta prosedur pengendalian intern, melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris, memelihara suatu struktur organisasi, memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten dan memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan

Good Corporate Governance bagi Bank Umum, dewan direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan secara independen antara lain :

- a. Wajib mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Wajib melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- d. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance*, direksi paling kurang wajib membentuk: Satuan Kerja Audit Intern; Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan Satuan Kerja Kepatuhan.
- e. Wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- g. Wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan Komisaris.
- h. Wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yaitu: pengaturan etika kerja; waktu kerja; dan pengaturan rapat.

- i. Wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
- j. Wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi lain dan/atau pemegang saham Bank.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut, dalam menegakkan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada bank, dewan direksi juga memiliki larangan-larangan antara lain:

- a. Dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- b. Anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
- c. Mayoritas anggota direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi dan/atau dengan anggota dewan komisaris.
- d. Dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- e. Dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut: proyek bersifat khusus; didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;

- f. Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- g. Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Ukuran dewan direksi diukur berdasarkan jumlah anggota dewan direksi yang ada dalam perusahaan (Faisal, 2005). Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.

2.3.3 Mekanisme Pemantauan Pengungkapan

Komite audit berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM Kep. 29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten,
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Komite audit dalam penelitian ini diukur menggunakan skala rasio melalui presentase anggota komite audit yang berasal dari luar komite audit terhadap seluruh anggota komite audit (Isnanta, 2008, dalam Sari, 2010).

$$AUDT = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit luar}}{\text{Jumlah seluruh anggota komite audit}}$$

2.4 Kinerja Perbankan

Menurut Mahsun (2006) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk

mencapai tujuan yang diukur dengan mendasarkan pada suatu perbandingan dengan berbagai standar. Kinerja adalah pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar.

Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional perusahaan. Sedangkan Mahsun (2006) juga menyatakan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang/jasa, kualitas barang/jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan itu merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif (Sari, 2010).

Kinerja perusahaan menurut Hastuti (2005) dalam Purwani (2010) adalah hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Jadi kinerja merupakan pengawasan terus menerus dan pelaporan penyelesaian program, terutama kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menilai kinerja perusahaan perlu melibatkan analisis dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan yang dibuat dan mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif.

Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan suatu metode atau pendekatan. Pengukuran kinerja perusahaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran kinerja non keuangan (*non financial performance measurement*) dan pengukuran kinerja keuangan (*financial performance measurement*). Kinerja non keuangan adalah pengukuran kinerja dengan menggunakan informasi-informasi non keuangan yang lebih dititik-beratkan dari segi kualitas pelayanan kepada pelanggan. Sedangkan pengukuran kinerja keuangan adalah penggunaan informasi-informasi keuangan dalam mengukur suatu kinerja perusahaan. Informasi keuangan yang digunakan adalah laporan rugi laba dan neraca.

Kinerja bisa dilihat dari laporan laba rugi, kinerja finansial yang digunakan tercermin dari *Earning Before Interest and Tax (EBIT)* dan *Earning Available for Common Stock (EACS)*. EBIT menggambarkan profit yang tersisa setelah dikurangi dengan pengeluaran operasional dari *gross margin*. EBIT ini menggambarkan keuntungan perusahaan dari aktivitas bisnis sebelum dikurangi pajak. Sedangkan EACS menggambarkan keuntungan perusahaan setelah dikurangi pajak dan pungutan finansial lain (Wibisono, 2004 dalam Sari, 2010).

Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Efektifitas terjadi apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau suatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi diartikan sebagai rasio (perbandingan) antara masukan dan keluaran yaitu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran yang optimal.

Kinerja perusahaan juga bisa diukur dengan rasio-rasio keuangan lain seperti *Market Share Growth*, *Return On Investment (ROI)*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *ROI growth*, *Return On Sales (ROS)*, *ROS growth assets*, *price earning ratio*, *Tobin's Q*, dan rasio-rasio keuangan lainnya.

Pengertian kinerja telah diungkapkan oleh beberapa ahli seperti Caves dalam Syofyan (2003) yaitu penilaian bagaimana hasil ekonomi dari kegiatan industri memberikan kemungkinan kontribusi terbaik guna mencapai tujuan. Dari pendapat tersebut di atas dapat didefinisikan bahwa kinerja adalah seberapa baik hasil yang dicapai oleh perusahaan dalam mencapai tujuan perekonomian, dimana tujuan perekonomian adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi.

Gilbert dalam Syofyan (2003) menyatakan ukuran kinerja perbankan yang paling tepat adalah dengan mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba atau profit dari berbagai kegiatan yang dilakukannya, sebagaimana umumnya tujuan suatu perusahaan didirikan adalah untuk mencapai nilai (*value*) yang tinggi, dimana untuk mencapai *value* tersebut perusahaan harus dapat secara efisien dan efektif dalam mengelola berbagai macam kegiatannya. Salah satu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh keefisienan dan keefektifan yang dicapai adalah dengan melihat profitabilitas perusahaan, semakin tinggi profitabilitas maka semakin efektif dan efisien juga pengelolaan kegiatan perusahaan.

Ukuran profitabilitas bank dapat dilihat dari berbagai macam rasio, seperti *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Net Profit Margin (NPM)*, dan Rasio Biaya Operasional. Lebih khusus menurut Gilbert (Syofyan, 2003) ukuran profitabilitas yang tepat dalam menilai kinerja industri perbankan adalah ROA.

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Dalam penelitian ini menggunakan alat ukur rasio ROA sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan operasi dengan total aktiva yang ada. ROA adalah rasio pendapatan sebelum bunga dan pajak (EBIT) atau net pendapatan dibagi dengan nilai buku aset di awal tahun fiskal. ROA mengukur pendapatan perusahaan dalam hubungannya dengan semua sumber daya itu pada bagian disposal (modal pemegang saham ditambah dana jangka pendek dan panjang yang dipinjam).

ROA menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh aset yang dimiliki perusahaan. ROA digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA memiliki keuntungan yaitu ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan laba rugi dan neraca. Keunggulan lain yang didapat dari pengukuran kinerja dengan ROA adalah perhitungan ROA sangat mudah dihitung dan dipahami. ROA juga merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha. Dalam pengukuran kinerja keuangan perusahaan, setiap unit organisasi yang ada

dalam perusahaan dapat menggunakan ROA untuk mengetahui profitabilitas dari setiap unit usaha

Copeland dan Weston (1994) dalam Firmansyah (2006) menyatakan bahwa ROA mencoba mengukur efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber dayanya. Tinggi rendahnya ROA mengindikasikan seberapa besar efisiensi penggunaan modal dan turun naik pendapatan. Jika perusahaan tidak memiliki utang, maka laba atas aset dan laba atas ekuitas akan sama. Suatu indikator bagaimana keuntungan perusahaan relatif terhadap total aset. ROA memberikan ide mengenai bagaimana manajemen yang efisien menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan penghasilan. Dihitung dengan membagi penghasilan tahunan perusahaan dari total aset, ROA ditampilkan sebagai persentase (Brigham and Houston, 2006). Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (atau pendanaan) yang diberikan pada perusahaan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Klapper dan Love (2002) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *return on assets* (ROA) dan *Tobin's Q*. Penemuan penting lainnya adalah bahwa penerapan *corporate governance* di tingkat perusahaan lebih memiliki arti dalam negara berkembang dibandingkan dalam negara maju. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang baik akan memperoleh manfaat yang lebih besar di negara-negara yang lingkungan hukumnya buruk.

Darmawati, dkk (2004) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE. Namun *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pasar yang diukur dengan *Tobin's Q*. Hal itu mungkin dikarenakan respon pasar terhadap implementasi *corporate governance* tidak bisa secara langsung (*immediate*) akan tetapi membutuhkan waktu.

Belkhir (2005) dari UAE University memeriksa hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja perbankan dengan menggunakan sampel sebanyak 260 bank dan lembaga simpan pinjam/keuangan lain selama periode 1995-2002. Dimana kinerja bank diproksikan dengan *Tobin's q* dan *ROA*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol berupa *Bank Size* yang diproksikan dengan logaritma natural dari total *asset*, *CEO ownership*, serta *CEO-chairman duality*. Dari penelitian yang menggunakan metode regresi ini, didapatkan suatu hasil yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan dan struktur dewan terkait satu sama lain.

Arifin (2005) meneliti hubungan antara struktur modal, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, struktur aset, pertumbuhan aset, ukuran perusahaan, *risk share return* (VAR) dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan EVA menemukan bukti bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan namun struktur modal berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap struktur modal namun kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap struktur modal perusahaan.

Sayidah (2007) meneliti pengaruh kualitas *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan proksi (*ROA*, *ROI*, *ROE*) serta variabel kontrol berupa *book to market*, umur perusahaan, total aset dengan menggunakan sampel 22 perusahaan dengan peringkat 10 besar skor CGPI selama tahun 2003-2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja perbankan, sedangkan variabel kontrol yang berpengaruh hanyalah variabel *book to market* terhadap *ROA*.

Nuswandari (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance perception index* terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan proksi *ROE* sebagai kinerja operasional dan *Tobin's Q* sebagai kinerja pasar. Sampel penelitian menggunakan 101 perusahaan selama periode 2001-2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *ROE* namun *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *Tobin's Q*.

Puspitasari dan Ernawati (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan badan usaha. Mekanisme *Corporate Governance* diukur dengan indikator kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, *debt*, *firm size*, *CEO status*, *CEO foreign* sementara kinerja diproksikan dengan *PER*, *ROA*, *ROE*, *Modified Tobin's Q*. Sampel yang

digunakan yaitu seluruh perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia secara tepat waktu selama tahun 2005-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan konsentrasi kepemilikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *ROA*, *ROE*, *PER* dan *Tobin's Q*.

Amyulianthy (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan publik Indonesia dengan menggunakan sampel perusahaan yang masuk dalam indeks LQ 45 selama Januari 2010 hingga desember 2010. *Corporate governance* diprosikan dengan kepemilikan manajerial, ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi, KAP *Big 4*, dengan variabel dependen kinerja perusahaan (*Tobin's Q*). Hasil penelitian menunjukkan bukti bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan proksi *Tobin's Q* sedangkan KAP *Big 4* berpengaruh signifikan negatif.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian-Penelitian terdahulu

Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Klapper dan Love (2002)	<i>corporate governance</i> , <i>Return On Assets (ROA)</i> dan <i>Tobin's Q</i>	Adanya hubungan positif antara <i>corporate governance</i> dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan <i>Return On Assets (ROA)</i> dan <i>Tobin's Q</i>
Darmawati, dkk (2004)	<i>corporate governance</i> kinerja (<i>ROE</i> , <i>Tobin's Q</i> dengan variabel kontrol berupa komposisi aktiva, kesempatan tumbuh, ukuran perusahaan	Hanya variabel <i>corporate governance</i> yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan <i>ROE</i> namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara <i>corporate governance</i> terhadap kinerja Pasar yang diukur

		dengan <i>Tobin's Q</i>
Belkhir (2005)	ukuran dewan komisaris dengan kinerja perbankan (<i>Tobin's Q</i> dan <i>ROA</i>) dengan menggunakan variabel kontrol berupa <i>Bank Size</i>	terdapat hubungan positif antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
Arifin (2005)	Struktur modal, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, struktur asset, pertumbuhan asset, ukuran perusahaan, <i>risk share return</i> (VAR) dengan kinerja perusahaan (EVA)	Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan
Sayidah (2007)	Kualitas <i>corporate governance</i> , Kinerja perusahaan (<i>ROA</i> , <i>ROI</i> , <i>ROE</i>) dengan variabel kontrol berupa <i>book to market</i> , umur perusahaan, total aset	Kualitas <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan, variabel kontrol yang berpengaruh yaitu <i>book to market</i> terhadap <i>ROA</i>
Nuswandari (2009)	<i>Corporate governance</i> , kinerja perusahaan (<i>ROE</i> , <i>Tobin's Q</i>) dengan variabel kontrol komposisi aktiva, kesempatan tumbuh, ukuran perusahaan	<i>corporate governance</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap <i>ROE</i> dan tidak berpengaruh terhadap <i>Tobin's Q</i>
Puspitasari dan Ernawati (2010)	Kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, debt, <i>firm size</i> , <i>CEO status</i> , <i>CEO foreign</i> dengan variabel dependen yaitu <i>PER</i> , <i>ROA</i> , <i>ROE</i> , <i>Modified Tobin's Q</i>	<i>Corporate governance</i> yang terdiri dari (kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan konsentrasi kepemilikan) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>ROA</i> , <i>ROE</i> , <i>PER</i> dan <i>Tobin's Q</i> .
Dewayanto (2010)	Kepemilikan saham pengendali, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran dewan direksi, ukuran dewan	Mekanisme pemantauan kepemilikan tidak signifikan, mekanisme pemantauan internal menunjukkan hubungan yang negatif signifikan, rasio

	komisaris, komisaris independen, rasio kecukupan modal, variabel eksternal, ukuran bank	kecukupan modal dan auditor eksternal menunjukkan hubungan positif signifikan
Amyulianthy (2012)	kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi, KAP Big 4, kinerja perusahaan (<i>Tobin's Q</i>)	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan proksi <i>Tobin's Q</i> sedangkan KAP Big 4 berpengaruh signifikan negatif.

2.6 Kerangka Pemikiran

2.6.1 Hubungan Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perbankan

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja.

Corporate governance menurut Nuswandari (2009) merupakan mekanisme pengendali (*diciplinary forces*) yang efektif menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajemen. Setiap keputusan manajemen yang diambil didasarkan pada kepentingan pemegang saham dan *resources* yang ada digunakan semata-mata untuk kepentingan pertumbuhan dan peningkatkan nilai perusahaan. Manajer bekerja secara efektif dan efisien sehingga dapat menurunkan biaya modal dan mampu meminimalkan risiko.

Tindakan tersebut akan menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Dengan demikian penerapan *good corporate governance* di perusahaan mempengaruhi secara positif kinerja operasional perusahaan.

Di dalam mekanisme *corporate governance* menurut Belkhir (2005) prinsipal bekerja sama untuk memberikan insentif kepada para manajer sehingga mampu mengurangi masalah keagenan yang muncul antara pemegang saham dan manajer yang dihasilkan dari pemisahan antara kepemilikan dan pengawasan. Johnson, dkk (2000) dalam Dermawati, (2004) memberikan bukti bahwa rendahnya kualitas *corporate governance* dalam suatu negara berdampak negatif pada pasar saham dan nilai tukar mata uang negara yang bersangkutan pada masa krisis di Asia. Johnson dkk (2000) juga mendefinisikan *corporate governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham minoritas.

Penjelasan teoritis yang mendasari penelitian Johnson dkk. (2000) adalah bahwa jika ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer meningkat pada saat tingkat kembalian investasi yang diharapkan oleh investor jatuh, maka *shock* yang diakibatkan dari menurunnya tingkat kepercayaan investor akan mendorong terjadinya penurunan *capital inflow* dan meningkatnya *capital outflows* dari suatu negara. Akibat selanjutnya adalah menurunnya harga saham dan nilai tukar mata uang negara yang bersangkutan.

Klapper dan Love (2002) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *return on*

assets (ROA) dan Tobin's Q. Penemuan penting lainnya dari penelitian mereka adalah bahwa penerapan *corporate governance* di tingkat perusahaan lebih memiliki arti dalam negara berkembang dibandingkan dalam negara maju. Dengan adanya mekanisme *good corporate governance* yang baik diharapkan mampu meningkatkan kinerja perbankan. Mekanisme *good corporate governance* sendiri meliputi indikator kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan komite audit. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1 mekanisme *good corporate governance* secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.

2.6.2 Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perbankan

Kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar. Menurut Siregar dan Utama (2005), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*. Persentase saham institusi ini diperoleh dari penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri.

Investor institusional mayoritas memiliki kecenderungan untuk berkompromi atau berpihak kepada manajemen dan mengabaikan kepentingan

pemegang saham minoritas. Anggapan bahwa manajemen sering mengambil tindakan atau kebijakan yang non-optimal dan cenderung mengarah pada kepentingan pribadi mengakibatkan strategi antara investor institusional dengan pihak manajemen ditanggapi negatif oleh pasar.

Kepemilikan institusional yang semakin besar akan mengakibatkan kontrol eksternal yang lebih besar di dalam suatu perusahaan. Selain itu kepemilikan institusional yang merupakan pemilik saham mayoritas bisa saja mengabaikan kepentingan pemilik saham minoritas sehingga dalam pengambilan keputusan pemegang saham mayoritas lebih dominan dan unggul. Semakin besar kontrol eksternal akan menyebabkan kebijakan yang diambil akan cenderung mengikuti kebijakan dari institusi eksternal. Hal ini tentunya berdampak pada penurunan harga saham perusahaan dipasar modal sehingga dengan kepemilikan institusional dapat menurunkan kinerja perusahaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Daniri (2005) dalam Amyulianthy (2012) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusi menurunkan kinerja perusahaan. Faisal (2005) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional belum efektif untuk memonitor manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional gagal menjadi mekanisme meningkatkan kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2 kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan.

2.6.3 Hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perbankan

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Kepemilikan manajemen menurut Welvin dan Herawaty (2010) adalah saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya.

Hasil penelitian Hermalin dan Weisbach (2003) menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial akan menurunkan keintegritasan laporan keuangan dan berdampak pula pada menurunnya kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan karena manusia pada umumnya memiliki sifat *self interest* sehingga seorang manajer ingin menampilkan laporan keuangan yang sebaik-baiknya di depan *stakeholders* agar kinerja perusahaan disini terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya sehingga dari asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004, dalam Sama'ni 2008). Sehingga dari sifat *opportunistic* ini manajer cenderung akan melakukan *earning management* dalam pelaporan keuangan, karena manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham).

Faisal (2004) menemukan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial gagal menjadi mekanisme guna meningkatkan kinerja perusahaan.

Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.

Kontra pendapat muncul dalam penelitian Wedari (2004), menemukan bahwa *insider ownership* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan oleh insider akan menaikkan kinerja perusahaan adalah bukti. Temuan dalam riset Xie, *et al.* (2001) mengindikasikan bahwa kepemilikan *insider* merupakan insentif bagi peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini didukung oleh profitabilitas yang meningkat juga memberikan nilai perusahaan yang meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3 kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan

2.6.4 Hubungan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja Perbankan

Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan Oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* menyatakan bahwa Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara.

Menurut Chtourou *et al* (2001), jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Jumlah dewan

yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence*. Maksud dari pandangan *resources dependence* adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik.

Mayangsari (2003) dalam Rafriny (2012) menyatakan bahwa tugas komisaris utama sebagai *primus inter pares* yaitu mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi sebagai penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan guna memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H4 Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan

2.6.5 Hubungan Ukuran Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Perbankan

Mayangsari (2003) dalam Rafriny (2012) menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi sebagai penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan guna memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan.

Komisaris independen menurut Susiana Dan Arleen Herawaty (2007) merupakan sebuah badan di dalam suatu perusahaan yang biasanya berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam

pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.

Komisaris independen juga merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Beasley (1996) menyarankan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (komisaris independen), meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitiannya juga melaporkan bahwa komposisi dewan komisaris independen lebih penting untuk mengurangi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, daripada kehadiran komite audit.

Barnhart & Rosenstein (1998) dalam Lastanti (2004) melakukan penelitian mengenai “*Board Composition, Managerial Ownership and Firm Performance*”, yang membuktikan bahwa semakin tinggi perwakilan dari *outsider director* (komisaris independen), maka semakin tinggi independensi dan efektivitas *corporate board* sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hubungan antara komisaris independen dan kinerja perbankan juga didukung oleh perspektif bahwa dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap perusahaan secara objektif dan independen, menjamin pengelolaan yang bersih dan sehatnya operasi perusahaan sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan (Jones, 1979, dalam Lastanti, 2004). Komisaris independen hanya mewakili kepentingan pemegang saham minoritas saja.

Dapat disimpulkan pula bahwa keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas suatu laporan keuangan yang

dihasilkan oleh manajemen. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena di dalam perusahaan terdapat badan yang memonitoring secara langsung dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H5 Komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.

2.6.6 Hubungan Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Perbankan

Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh ukuran dan komposisi dewan direksi dalam kegiatan perusahaan. Ukuran dan komposisi dewan direksi dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas monitoring. Ukuran dan komposisi dewan direksi juga mempengaruhi hubungan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan.

Semakin besar ukuran dan komposisi dewan direksi akan berdampak positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan jika komposisi dewan direksi lebih banyak didominasi oleh dewan direksi yang berasal dari luar perusahaan dan kinerja serta nilai perusahaan akan rendah jika ukuran dan komposisi dewan direksi berasal dari dalam perusahaan.

Apabila struktur dewan direksi suatu perusahaan lebih banyak berasal dari luar perusahaan (*outside directors*) maka akan berdampak pada kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik. Argumentasi ini diberikan dengan pertimbangan bahwa *outside director* dapat melakukan fungsi monitoring dengan lebih baik, pengambilan keputusan dan juga fungsi perbaikan atas kesalahan maupun

kecurangan dalam pelaporan keuangan, sehingga akan berdampak pada laba (*earnings*) yang akhirnya akan berdampak pada kinerja perusahaan.

Faisal (2005) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Pfefer (1973) dan Pearce & Zahra (1992) dalam Faisal (2005) menyatakan bahwa peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H6 Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan

2.6.7 Hubungan Ukuran Komite Audit terhadap Kinerja Perbankan

Komite audit menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya. Ketika komite audit menjalankan tugasnya dengan baik maka tugas

pengawasan menjadi lebih baik sehingga kinerja perbankan meningkat. Utama dan Leonardo (2006) memberikan bukti empiris tentang dampak komposisi komite audit dan kendali dari pengelola perusahaan pada efektivitas komite audit berdasarkan *survey* atas komite audit perusahaan yang *listing* di BEI. Mereka menemukan bukti bahwa komposisi komite audit memiliki dampak positif yang signifikan dalam efektivitas komite audit. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit secara signifikan selain komposisinya, diantaranya kekuatan mengendalikan perusahaan oleh pemegang saham, makin banyaknya perwakilan komisaris independen dalam dewan komisaris, pengendalian oleh dewan komisaris, dan lamanya komite audit menjabat.

Wilopo (2004) menganalisis hubungan dewan komisaris independen, komite audit, kinerja perusahaan dan akrual diskresioner. Dari penelitian tersebut dilaporkan bahwa kehadiran komite audit dan dewan komisaris independen mampu mempengaruhi secara negatif praktik manajemen laba di perusahaan. Hal ini menandakan bahwa mekanisme *corporate governance* diatas penting untuk menjamin terlaksananya praktik perusahaan yang adil (*fair*) dan transparan.

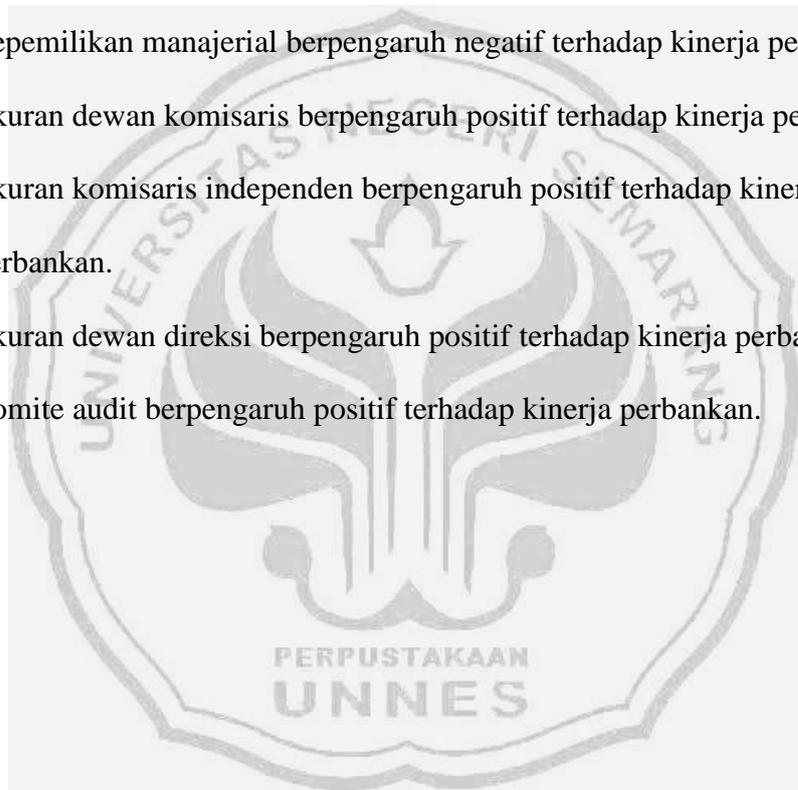
Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H7 Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan

2.7 Pengembangan Hipotesis

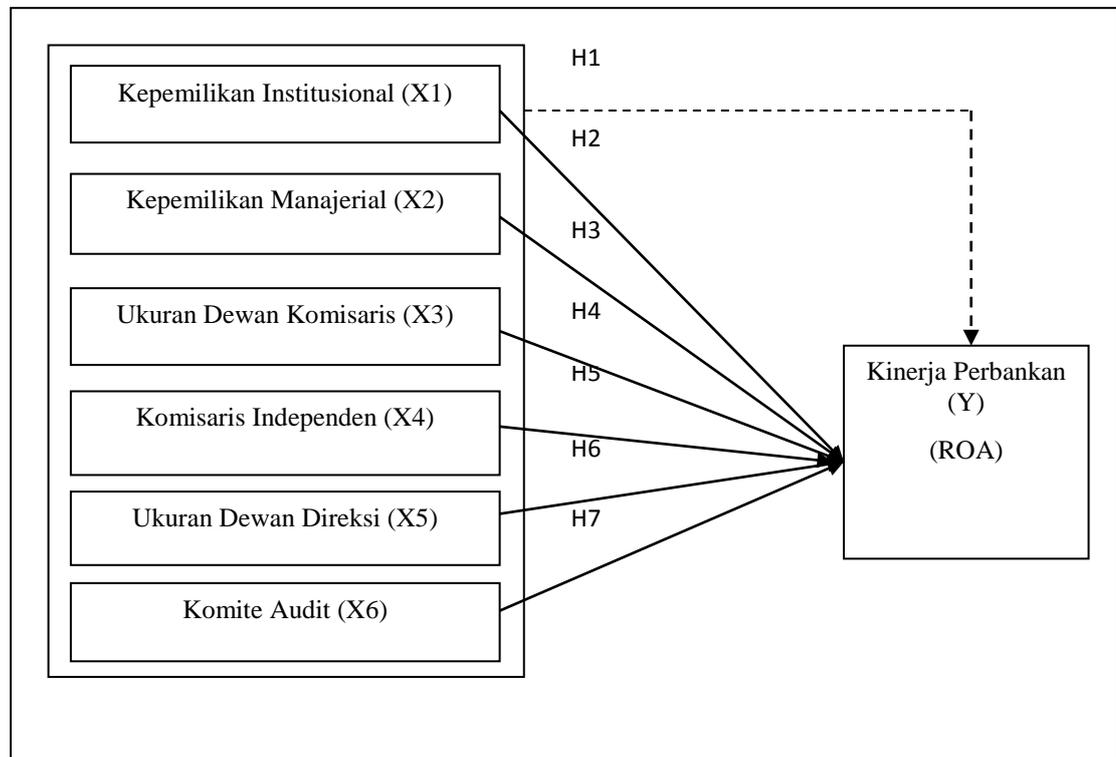
Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- H1 : Mekanisme *good corporate governance* secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.
- H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan.
- H3 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan.
- H4 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.
- H5 : Ukuran komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.
- H6 : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.
- H7 : Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.



2.8 Model Penelitian

Berikut ini merupakan gambar kerangka penelitian dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis data yang digunakan adalah kombinasi antara *time series* dan *cross section data*, yang disebut *pooling data*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan perbankan (*annual report*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2009 – 2011 atau dapat dilihat pada situs resminya yaitu www.idx.co.id, website Bank Indonesia periode 2009-2011.

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi itu sendiri oleh Indriantoro (2002) diartikan sebagai sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 32 bank yang pada tahun 2009 sampai tahun 2011 menerbitkan sahamnya dan melaporkan laporan keuangan tahunannya di Bursa Efek Indonesia. Penggunaan satu kelompok perusahaan untuk menghindari perbedaan karakteristik antara perusahaan perbankan dan non perbankan, atau dengan kata lain mendasarkan pertimbangan pada homogenitas.

Berikut populasi bank umum konvensional yang listing di BEI periode tahun 2009-2011:

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

NO	Kode	Nama Perusahaan
1	AGRO	Bank Agroniaga
2	BACA	Bank Capital Indonesia
3	BAEK	Bank Ekonomi Raharja
4	BBCA	Bank Central Asia
5	BBKP	Bank Bukopin
6	BBNI	Bank Negara Indonesia
7	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan
8	BBTN	Bank Tabungan Negara
9	BCIC	Bank Mutiara
10	BCIP	Bank Bumi Citra Permai
11	BDMN	Bank Danamon Indonesia
12	BEKS	Bank Eksekutif Internasional
13	BJBR	Bank Jawa Barat
14	BKSW	Bank Kesawan
15	BMRI	Bank Mandiri
16	BNBA	Bank Bumi Arta
17	BNGA	Bank CIMB Niaga
18	BNII	Bank Internasional Indonesia
19	BNLI	Bank Permata
20	BSIM	Bank Sinarmas
21	BSWD	Bank Swadesi
22	BTPN	Bank Tabungan Pensiun Nasional
23	BVIC	Bank Victoria Internasional
24	INPC	Bank Artha Graha Investama
25	MAYA	Bank Mayapada Internasional
26	MCOR	Bank Windu Kentjana Internasional
27	MEGA	Bank Mega
28	NISP	Bank OCBC NISP
29	PBNB	Bank Pan Indonesia
30	SDRA	Bank Himpunan Saudara 1906
31	BABP	PT. Bank ICB Bumi Putra
32	BBRI	PT. Bank Rakyat Indonesia

Sumber : www.idx.co.id

3.2.2 Sampel

Penelitian ini hanya mengambil sebagian dari populasi, hal ini disebabkan keterbatasan penelitian. Adapun sampel penelitian ini diambil setelah memenuhi beberapa kriteria yang berlaku bagi penerapan definisi operasional variabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009 sampai tahun 2011.

3.2.3 Teknik pengambilan sampel

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel atau sebagian elemen populasi untuk memahami karakteristik dari keseluruhan populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu sampel yang ditarik dengan menggunakan pertimbangan. Teknik pengambilan sampel ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif.

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Bank yang terdaftar di BEI dan mempunyai laporan keuangan yang memuat data yang diperlukan selama tahun 2009 sampai tahun 2011.
2. Laporan keuangan harus mempunyai tahun buku yang berakhir 31 Desember.
3. Perusahaan harus sudah *listing* sebelum akhir periode penelitian.

Selain kriteria diatas, untuk menentukan ukuran sampel penelitian dapat digunakan rumus *Slovin* yaitu:

$$n = \frac{N}{(N \cdot d^2) + 1}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel minimum

N = Ukuran Populasi

d = Tingkat ketepatan

Dengan menggunakan rumus diatas, maka jumlah ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut :

$N = 32$ perusahaan perbankan yang listing di BEI tahun 2009 – 2011

$d = 0,1$ (berdasarkan tingkat ketepatan menurut *slovin*)

Maka jumlah sampel minimal adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{32}{(32 \cdot 0,1^2) + 1} \\
 &= \frac{32}{(32 \cdot 0,01) + 1} \\
 &= \frac{32}{(0,32) + 1} \\
 &= \frac{32}{1,32} \\
 &= 24,242424
 \end{aligned}$$

Untuk mempermudah perhitungan maka jumlah sampel yang ditarik adalah minimal 24. Jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 24 perusahaan yang listing di BEI tahun 2009 – 2011 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan
1	AGRO	PT. Bank Agroniaga
2	BACA	PT. Bank Capital Indonesia
3	BAEK	PT. Bank Ekonomi Raharja

4	BBCA	PT. Bank Central Asia
5	BBNI	PT. Bank Negara Indonesia
6	BBNP	PT. Bank Nusantara Parahyangan
7	BDMN	PT. Bank Danamon Indonesia
8	BKSW	PT. Bank Kesawan
9	BMRI	PT. Bank Mandiri
10	BNBA	PT. Bank Bumi Arta
11	BNGA	PT. Bank CIMB Niaga
12	BNII	PT. Bank Internasional Indonesia
13	BNLI	PT. Bank Permata
14	BSWD	PT. Bank Swadesi
15	BTPN	PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional
16	BVIC	PT. Bank Victoria Internasional
17	INPC	PT. Bank Artha Graha Investama
18	MAYA	PT. Bank Mayapada Internasional
19	MCOR	PT. Bank Windu Kentjana Internasional
20	MEGA	PT. Bank Mega
21	PNBN	PT. Bank Pan Indonesia
22	SDRA	PT. Bank Himpunan Saudara 1906
23	BABP	PT. Bank ICB Bumi Putra
24	BBRI	PT. Bank Rakyat Indonesia

Sumber : www.idx.co.id

3.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan variabel yang terdiri dari enam variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen). Variabel independen dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit. Variabel dependennya adalah kinerja perusahaan perbankan yang diukur oleh ROA.

3.3.1 Variabel Dependen

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini mencoba untuk menyelidiki hubungan langsung antara *good corporate governance* dengan

semua proksinya, yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA. *Return on Asset (ROA)* adalah rasio pendapatan sebelum bunga dan pajak (EBIT) atau net pendapatan dibagi dengan nilai buku aset di awal tahun fiskal. *Return on Asset* mengukur pendapatan perusahaan dalam hubungannya dengan semua sumber daya itu pada bagian disposal (modal pemegang saham ditambah dana jangka pendek dan panjang yang dipinjam).

ROA memberikan ide mengenai bagaimana manajemen yang efisien menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan penghasilan. Dihitung dengan membagi penghasilan tahunan perusahaan dari total aset, ROA ditampilkan sebagai persentase (Brigham and Houston, 2006).

$$ROA = \frac{\text{Rata - rata laba sebelum pajak}}{\text{Total Asset}}$$

3.3.2 Variabel Independen

1. Kepemilikan Institusional

Wahidahwati (2002) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan presentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi perusahaan pada akhir tahun. Sejalan dengan itu Siregar dan Utama (2005) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*. Kepemilikan institusional diukur dengan skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan total saham perusahaan.

$$INST = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki investor institusi}}{\text{Total modal saham perusahaan yang beredar}}$$

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan pemegang saham dari manajemen yang terdiri direktur dan komisaris yang diukur dengan menggunakan presentase jumlah saham manajemen terhadap jumlah seluruh saham yang beredar. Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya (Susiana dan Herawaty 2007). Kepemilikan manajemen diukur menggunakan skala rasio melalui persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar.

$$MANJ = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen}}{\text{Total modal saham perusahaan yang beredar}}$$

3. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Pembentukan dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk memonitor kinerja manajer. Dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen. Ukuran dewan komisaris diukur berdasarkan seluruh jumlah anggota dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen.

4. Ukuran Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, komisaris

independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris independen diukur dengan menggunakan skala rasio melalui presentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan (Isnanta, 2008 dalam Sari, 2010).

$$INDP = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris dari luar perusahaan}}{\text{seluruh anggota dewan komisaris perusahaan}}$$

5. Ukuran Dewan Direksi

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Ukuran dewan direksi diukur berdasarkan jumlah anggota dewan direksi yang ada dalam perusahaan (Faisal, 2005).

6. Komite Audit

Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Menurut Kep. 29/PM/2004 komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Komite audit dalam penelitian ini diukur menggunakan skala rasio

melalui presentase anggota komite audit yang berasal dari luar komite audit (pihak independen) terhadap seluruh anggota komite audit (Isnanta, 2008, dalam Sari, 2010).

$$AUDT = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit luar}}{\text{Jumlah seluruh anggota komite audit}}$$

Tabel 3.3 Tabel Definisi Operasional dan Cara Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran
Kinerja	<i>Return on Asset</i> (ROA) adalah rasio pendapatan sebelum bunga dan pajak (EBIT) atau net pendapatan dibagi dengan nilai buku aset di awal tahun fiskal.	ROA = Laba sebelum pajak / rata-rata total aset
Kepemilikan Institusional	saham yang dimiliki oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan <i>investment banking</i> (Siregar dan Utama 2005).	rasio jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibanding total saham perusahaan
Kepemilikan Manajerial	saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya (Susiana dan Herawaty 2007).	rasio jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dibanding total saham perusahaan
Ukuran Dewan Komisaris	jumlah anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab mengawasi perusahaan baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan (Beiner <i>et al</i> , 2003).	Seluruh jumlah dewan komisaris yang berada di dalam perusahaan
Ukuran Komisaris Independen	Persentase antara jumlah komisaris yang berasal dari luar perusahaan (komisaris independen) terhadap total jumlah anggota dewan komisaris perusahaan (Isnanta, 2008 dalam Sari, 2010)	rasio anggota dewan komisaris independen dengan seluruh anggota dewan komisaris perusahaan
Ukuran Dewan Direksi	Ukuran dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi yang ada dalam perusahaan (Faisal, 2005).	jumlah seluruh anggota dewan direksi yang ada dalam perusahaan
Komite Audit	komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. (Isnanta, 2008 dalam Sari, 2010).	skala rasio melalui presentase komite audit yang berasal dari luar komite audit terhadap seluruh anggota komite audit

3.3.3 Kriteria Data

1. Kriteria Variabel ROA

Berdasarkan Siaran Pers Bank Indonesia No.7/ 69 /PSHM/Humas, bank-bank dengan kinerja baik tersebut diantaranya dapat berpotensi untuk menjadi bank jangkar (*anchor bank*) apabila memenuhi kriteria yang tercermin dari rasio *Return on Asset* (ROA) minimal 1,5%. Berikut ini merupakan kriteria ROA dalam perbankan:

Tabel 3.4 Kriteria Variabel ROA

No	Interval	kategori
1	≤ 0	sangat jelek
2	> 0 sampai ≤ 1	jelek
3	> 1 sampai ≤ 2	cukup baik
4	> 2 sampai ≤ 3	baik
5	> 3	sangat baik

Sumber : Data diolah , 2013

2. Kategori Variabel Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*.

Tabel 3.5 Kriteria Variabel Kepemilikan Institusional

No	Interval	kategori
1	$\leq 20\%$	sangat sedikit
2	$> 20\%$ sampai $\leq 40\%$	sedikit
3	$> 40\%$ sampai $\leq 60\%$	cukup banyak
4	$> 60\%$ sampai $\leq 80\%$	banyak
5	$> 80\%$	Sangat banyak

Sumber : Data diolah , 2013

3. Kategori Variabel Kepemilikan Manajerial

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Tabel 3.6 Kriteria Variabel Kepemilikan Manajerial

no	kelas	kategori
1	0 sampai 5%	Sangat sedikit
2	>5% sampai ≤ 10	sedikit
3	>10% sampai ≤ 15	cukup
4	>15% sampai ≤ 20	banyak
5	>20% sampai 25%	sangat banyak

Sumber : Data diolah , 2013

4. Kategori Variabel Ukuran Dewan Komisaris

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, jumlah anggota dewan komisaris pada perusahaan perbankan paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.

Tabel 3.7 Kriteria Variabel Ukuran Dewan Komisaris

no	kelas	kategori
1	0-2	sedikit
2	3-5	cukup
3	6-8	banyak
4	>8	sangat banyak

Sumber : Data diolah , 2013

5. Kategori Variabel Ukuran Komisaris Independen

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota dewan komisaris independen minimal 50% dari anggota dewan komisaris.

Tabel 3.8 Kriteria Variabel Ukuran Komisaris Independen

no	kelas	kategori
1	>0 sampai 30%	sedikit
2	>30 % sampai 50%	cukup
3	>50% sampai 70 %	banyak
4	>70 %	sangat banyak

Sumber : Data diolah , 2013

6. Kategori Variabel Ukuran Dewan Direksi

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, jumlah anggota direksi paling kurang 3 (tiga) orang.

Tabel 3.9 Kriteria Variabel Ukuran Dewan Direksi

no	kelas	kategori
1	0-2 orang	sedikit
2	3-5 orang	cukup
3	6-8 orang	banyak
4	>8 orang	sangat banyak

Sumber : Data diolah , 2013

7. Kategori variabel Ukuran Komite Audit

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum minimal sebesar 51% dari jumlah komite audit.

Tabel 3.10 Kriteria variabel Ukuran Komite Audit

no	kelas	kategori
1	>0 sampai 30%	sedikit
2	>30 % sampai 50%	cukup
3	>50% sampai 70 %	banyak
4	>70 % sampai 100%	sangat banyak

Sumber : Data diolah , 2013

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumenter yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan atau dokumen perusahaan (data sekunder) serta studi pustaka dari berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan *good corporate governance*. Data sekunder berisi tentang data-data *annual report* yang mencakup data *corporate governance* yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi, komite audit, ROA dan total asset perusahaan perbankan yang *listing* di BEI periode tahun 2009-2011.

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini mengasumsikan hubungan langsung antara mekanisme pemantauan *corporate governance* sebagai variabel independen dengan proksi untuk pengukurannya, dan kinerja perusahaan perbankan sebagai variabel dependen dengan ROA. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan program komputer *SPSS for Windows*. Sebelum melakukan hipotesis dengan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji lolos kendala linier atau uji asumsi klasik dan setelah itu dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F, uji t dan uji koefisien determinan R^2 .

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini mencakup

nilai rata-rata (*mean*), deviasi standar, minimum, dan maksimum. Mean digunakan untuk menghitung rata-rata variabel yang dianalisis. Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah atribut paling banyak yang diungkapkan di sektor perbankan. Analisis deskriptif ini tidak bertujuan untuk pengujian hipotesis

3.5.2 Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2006).

Cara membaca apakah data terdistribusi normal atau tidak adalah dengan analisis grafik, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola lonceng distribusi normal, sebaliknya jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak mengikuti pola lonceng distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Selain itu kenormalan data juga bisa dilihat melalui table hasil uji *Kolmogorov Smirnov* yang langsung memberikan keterangan “normal” apabila data terdistribusi secara normal.

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedosisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas.

Ghozali (2006) menyatakan bahwa model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas dan tidak heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi, heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas).

Selain dengan menggunakan analisis grafik, pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji *Glejser*. Uji ini mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2006). Alat analisis yang digunakan

adalah uji *Durbin – Watson Statistic*. Untuk mengetahui terjadi atau tidak autokorelasi dilakukan dengan membandingkan nilai statistik hitung Durbin Watson pada perhitungan regresi dengan statistik tabel *Durbin Watson* pada tabel. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut :

- a. Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau *upper bound* (du) dan ($4-du$) maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi.
- b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* (dl) maka koefisien autokorelasi > 0 , berarti ada autokorelasi positif.
- c. Bila nilai DW lebih besar dari ($4-dl$) maka koefisien autokorelasi < 0 , berarti ada autokorelasi negatif.

Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara ($4-du$) dan ($4-dl$), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.5.2.4 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2006). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi ini adalah dengan menganalisis matrik korelasi variabel – variabel bebas dan apabila korelasinya signifikan antar variabel bebas tersebut maka terjadi multikolinieritas. Seperti yang dijelaskan oleh Ghozali (2006) sebagai berikut :

- a. Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

- b. Jika nilai *tolerance* < 0,1 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Dalam pengolahan data peneliti menggunakan alat bantu software yang dikenal dengan SPSS. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan metode penggabungan (*pooling data*) merupakan model yang diperoleh dengan mengkombinasikan atau mengumpulkan semua data *cross section* dan data *time series*. Analisis regresi linear berganda dapat menjelaskan pengaruh antara variabel dependen dengan beberapa variabel bebas. *Pooling* data atau data panel dilakukan dengan cara menjumlahkan perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria selama periode pengamatan. Tujuannya adalah agar hasil penelitian dapat diinterpretasikan secara tepat dan efisien.

Persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y_a = a + \beta_1 \text{ INST} + \beta_2 \text{ MANJ} + \beta_3 \text{ KOMS} + \beta_4 \text{ INDP} + \beta_5 \text{ DIRK} + \beta_6 \text{ AUDT} + e$$

Keterangan :

Y_a = *Return On Assets*

a = konstanta

e = error

β = koefisien regresi

INST = Kepemilikan Instiusional

MANJ = Kepemilikan Manajerial

KOM S= Ukuran Dewan Komisaris

INDP= Komisaris Independen

DIRK = Ukuran Dewan Direksi

AUDT = Komite Audit

3.5.4 Uji Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati satu menandakan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel dependen (Ghozali, 2006).

3.5.5 Uji Statistik F

Pengujian ini bertujuan untuk menguji secara signifikan pengaruh variabel independen (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi, serta komite audit) terhadap variabel dependen (kinerja Keuangan) secara bersama-sama dengan melihat nilai signifikan F. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Jika signifikansi F statistik < 0.05 atau F hitung $> F$ tabel maka hipotesis diterima yang berarti semua variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen.

3.5.6 Uji Statistik t

Pengujian ini bertujuan untuk menguji secara signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Apabila tingkat signifikan yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima variabel independen tersebut berhubungan secara statistik terhadap variabel dependen. Uji t ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mempublikasikan laporan tahunannya di *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) secara konsisten dari tahun 2009-2011. Kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel adalah bank yang melakukan pengungkapan informasi mengenai mekanisme *good corporate governance* yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, ROA dalam laporan tahunannya. Berdasarkan data dari BEI pada tahun 2009-2011 populasi perusahaan perbankan sebanyak 32, namun berdasarkan kriteria sampel yang ada di dalam Tabel 4.1 maka dalam penelitian ini hanya digunakan sampel sebanyak 24 perusahaan perbankan.

Tabel 4.1

Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011	32
Peusahaan yang tidak masuk sebagai sampel:	
1. Tidak mempublikasikan dan/atau di delisting periode 2009	4
2. Tidak mempublikasikan dan/atau di delisting periode 2010	1
3. Tidak mempublikasikan dan/atau di delisting periode 2011	3
4. Tidak mengungkapkan informasi <i>corporate governance</i> , ROA,	0
Total Sampel Penelitian	24

Sumber: Bursa Efek Indonesia (BEI) 2009-2011

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah perusahaan perbankan yang tidak *listing* di BEI pada tahun 2009 sebanyak 4 perusahaan yaitu Bank Mutiara, Bank Bumi Citra Permai, Bank Jawa Barat, dan Bank Sinarmas. Jumlah perusahaan perbankan yang tidak *listing* di BEI pada tahun 2010 sebanyak 1 perusahaan yaitu Bank Tabungan Negara. Jumlah perusahaan perbankan yang tidak *listing* di BEI pada tahun 2011 sebanyak 3 perusahaan yaitu Bank Bukopin, Bank OCBC NISP, dan Bank Eksekutif Internasional.

Setelah melakukan pemilihan sampel maka disusunlah daftar perusahaan perbankan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sebanyak 24 perusahaan perbankan yang ditetapkan menjadi sampel dalam penelitian ini yang bisa dilihat di dalam Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Daftar Perusahaan Perbankan yang menjadi Sampel Penelitian Periode 2009-2011

No	Kode	Nama Perusahaan
1	AGRO	PT. Bank Agroniaga
2	BACA	PT. Bank Capital Indonesia
3	BAEK	PT. Bank Ekonomi Raharja
4	BBCA	PT. Bank Central Asia
5	BBNI	PT. Bank Negara Indonesia
6	BBNP	PT. Bank Nusantara Parahyangan
7	BDMN	PT. Bank Danamon Indonesia
8	BKSW	PT. Bank Kesawan
9	BMRI	PT. Bank Mandiri
10	BNBA	PT. Bank Bumi Arta
11	BNGA	PT. Bank CIMB Niaga
12	BNII	PT. Bank Internasional Indonesia
13	BNLI	PT. Bank Permata
14	BSWD	PT. Bank Swadesi
15	BTPN	PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional
16	BVIC	PT. Bank Victoria Internasional

No	Kode	Nama Perusahaan
17	INPC	PT. Bank Artha Graha Investama
18	MAYA	PT. Bank Mayapada Internasional
19	MCOR	PT. Bank Windu Kentjana Internasional
20	MEGA	PT. Bank Mega
21	PNBN	PT. Bank Pan Indonesia
22	SDRA	PT. Bank Himpunan Saudara 1906
23	BABP	PT. Bank ICB Bumi Putra
24	BBRI	PT. Bank Rakyat Indonesia

Sumber: www.idx.co.id (situs Bursa Efek Indonesia)

4.2 Hasil Statistik Deskriptif

Setelah data diperoleh, selanjutnya akan ditinjau secara deskriptif mengenai kondisi masing-masing variabel penelitian. Statistik Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Berikut ini adalah hasil uji statistik deskriptif menggunakan spss 16 :

Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	72	6.15	-1.70	4.45	1.8096	1.15898
INST	72	88.56	10.40	98.96	78.3621	22.09354
MANJ	72	21.70	.00	21.70	1.5264	4.15826
KOMS	72	7.00	2.00	9.00	5.0972	1.91480
INDP	72	66.67	33.33	100.00	55.4544	11.26092
DIRK	72	9.00	3.00	12.00	7.0972	2.86877
AUDT	72	66.67	33.33	100.00	59.2439	12.43767
Valid N (listwise)	72					

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2013

1. Kinerja (ROA)

ROA merupakan rasio laba sebelum pajak (*net income*) dibagi dengan total aktiva. Hasil temuan menunjukkan rata rata ROA perbankan nasional selama tahun 2009 sampai tahun 2011 berdasarkan kriteria tergolong cukup baik berkisar 1,8 %. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kemampuan manajemen perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya cukup efisien sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Semakin tinggi nilai ROA menunjukan manajemen efisien dalam menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan penghasilan

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*. Hasil temuan menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan perbankan selama tahun 2009 sampai tahun 2011 berdasarkan kriteria tergolong banyak berkisar 78%. Dengan kepemilikan dominan menyebabkan kemampuan untuk memonitor manajemen lebih besar. Hal ini sangat efektif mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba yang di lakukan para manajer.

3. Variabel Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki manajemen yang terdiri direktur dan komisaris. Hasil temuan menunjukkan kepemilikan saham perbankan nasional di Indonesia oleh manajerial selama tahun 2009 sampai tahun 2011 berdasarkan kriteria tergolong kecil karena kisaran angka dibawah 5%. Hal tersebut dikarenakan banyak anggota dewan yang tidak memiliki saham di dalam

perusahaan. Mayoritas anggota dewan direksi maupun dewan komisaris tidak memiliki saham di dalam perusahaan.

4. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan nasihat kepada dewan direksi. Pembentukan dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk memonitor kinerja manajer. Hasil temuan menunjukkan rata-rata anggota dewan komisaris dalam perusahaan perbankan selama tahun 2009 sampai tahun 2011 berdasarkan kriteria tergolong cukup banyak yaitu sebanyak 5 orang. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia jumlah anggota dewan komisaris minimal sebanyak 3 orang. Jumlah anggota dewan komisaris yang banyak akan membuat pengawasan lebih optimal.

5. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan kepentingan dengan anggota dewan komisaris lainnya. Hasil temuan menunjukkan rata-rata proporsi anggota dewan komisaris independen di dalam perusahaan perbankan nasional selama tahun 2009 sampai tahun 2011 tergolong banyak. Dengan jumlah anggota yang banyak maka komisaris tidak bisa mengintervensi komisaris independen karena jumlahnya sebanding dengan pihak internal sehingga membuat pengawasan independen.

6. Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan. Hasil temuan menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anggota dewan direksi selama tahun 2009 sampai tahun 2011 berdasarkan

kriteria tergolong banyak yaitu rata-rata sebanyak 7 orang. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa jumlah anggota dewan direksi minimal adalah sebanyak 3 orang. Dewan direksi yang banyak akan membuat tugas-tugas yang ada didalam perusahaan cepat selesai karena banyaknya sumber daya yang mampu menjalankan tugasnya di dalam perusahaan.

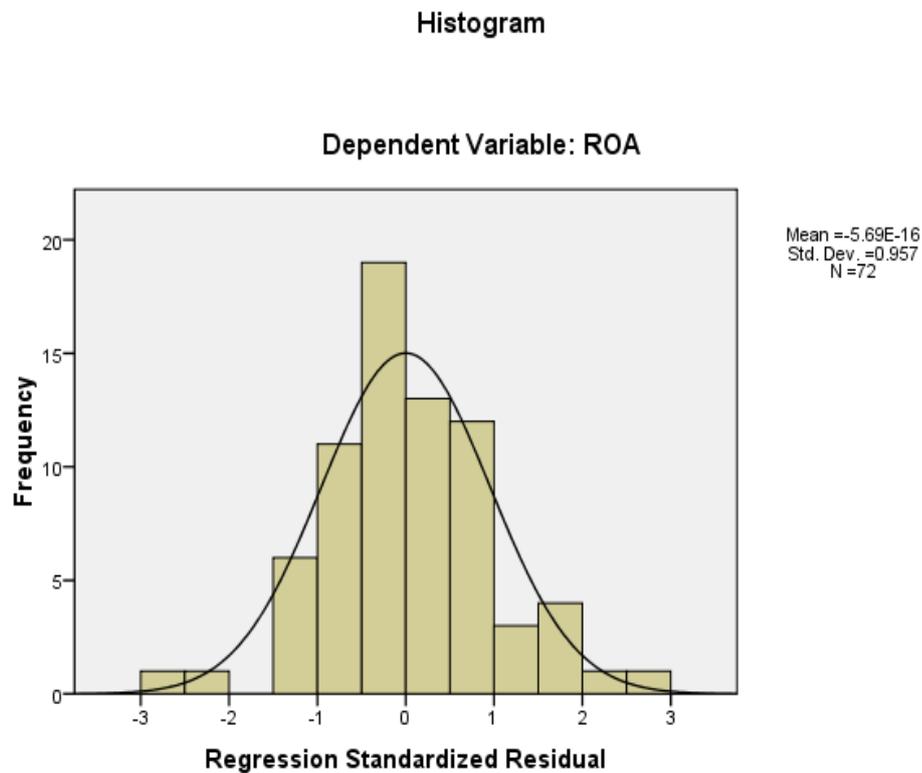
7. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Hasil temuan menunjukkan jumlah komite audit berdasarkan kriteria tergolong banyak. Selain itu berdasarkan peraturan Bank Indonesia jumlah minimal sebesar 51% dari jumlah komite audit. Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian internal.

4.3 Analisis Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini uji normalitas diuji menggunakan *grafik histogram*, *Kolmogorov Smirnov*, dan juga dilihat dari penyebaran data (titik) pada normal *P-Plot of Regression Standardized Residual*.



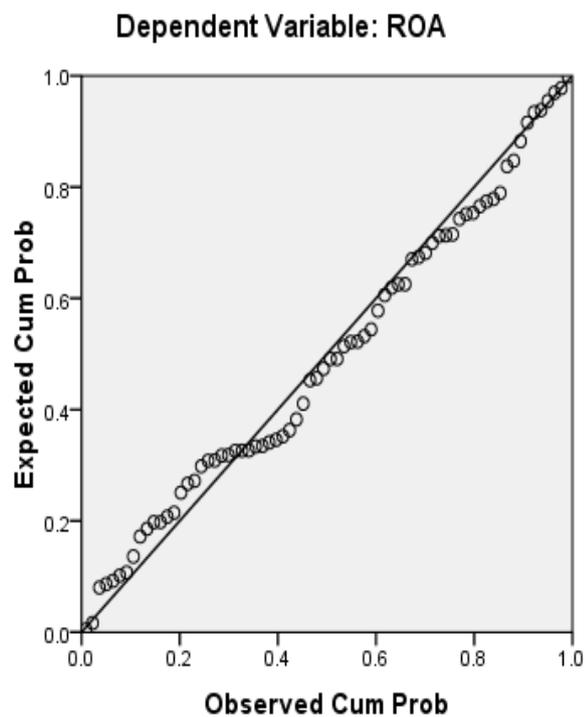
Gambar 4.1 Histogram

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2013

Pada tampilan histogram pada gambar 4.1 menunjukkan pola lonceng. Artinya grafik tersebut memberikan pola distribusi yang normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data mempunyai distribusi yang normal dan dapat digunakan untuk pengujian pada model selanjutnya.

Selain itu dapat juga dilihat melalui *P-Plot of Regression Standardized Residual* seperti pada grafik 4.2 berikut ini.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.2 Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2013

Hasil grafik *normal plot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian mempunyai distribusi yang normal. Sehingga model ini layak dipakai untuk analisis selanjutnya. Didukung dengan hasil uji *Kolmogorov Smirnov* pada tabel 4.4 di bawah ini :

Tabel 4.4 Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.99311312
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.054
Kolmogorov-Smirnov Z		.624
Asymp. Sig. (2-tailed)		.831

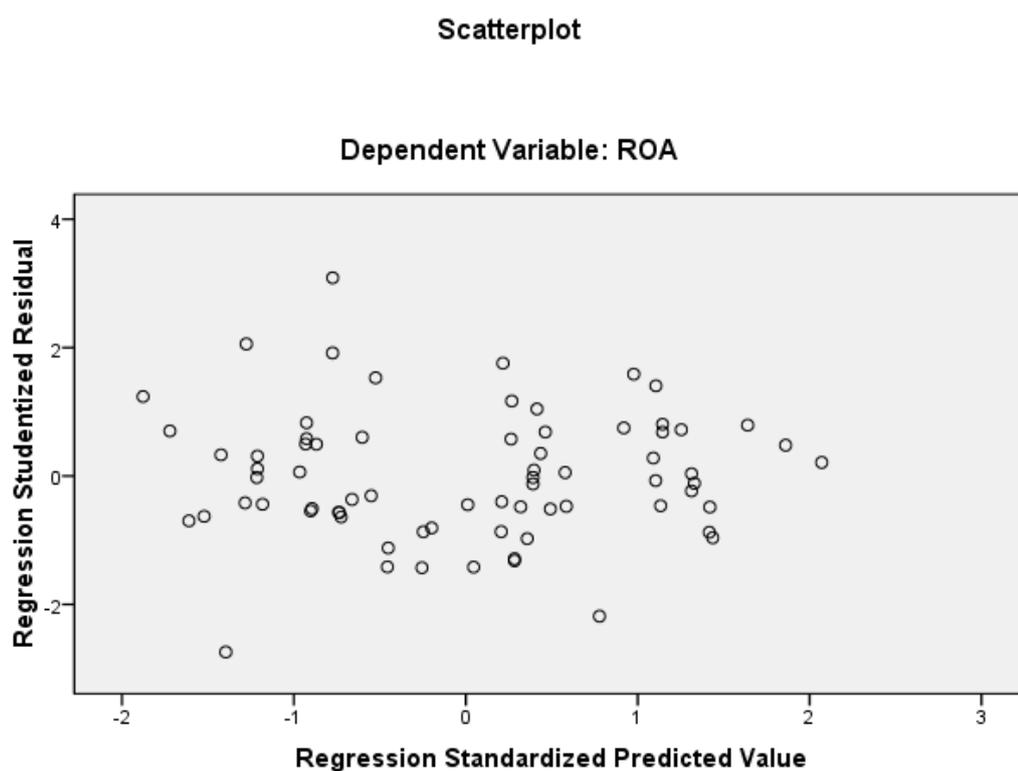
a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2013

Hasil uji *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan hasil bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari Asymp Sig (2-tailed) atau probabilitasnya yang menunjukkan angka 0,831, lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal.

4.3.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas dan tidak heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan uji *Glesjer* atau dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* berikut ini :



Gambar 4.3 Scatterplot

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2013

Hasil *Scatterplot* pada gambar 4.3 tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada pola yang jelas. Titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0

pada sumbu Y, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas. Selain itu, dapat dilihat juga pada tabel hasil uji glesjer di bawah ini :

Tabel 4.5 Hasil Uji Glejser

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.570	.667		-.854	.396
	INST	.003	.004	.105	.837	.406
	MANJ	-.030	.019	-.202	-1.595	.116
	KOMS	.054	.062	.165	.874	.385
	INDP	.011	.007	.203	1.673	.099
	DIRK	-.039	.040	-.181	-.977	.332
	AUDT	.009	.006	.177	1.446	.153

a. Dependent Variable: abresid

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2013

Hasil uji *Glesjer* pada Tabel 4.5 menunjukkan koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan secara statistik. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi yang semuanya diatas tingkat kepercayaan 5% ($\alpha = 0,05$). Jadi dapat disimpulkan model regresi layak dan terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada tahun periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Terbebasnya suatu model dari autokorelasi dapat dilihat dari angka *Dubin Watson* pada tabel 4.6 di bawah ini:

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.516 ^a	.266	.198	1.03794	1.889

a. Predictors: (Constant), AUDT, INDP, INST, MANJ, DIRK, KOMS

b. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2013

Hasil uji autokorelasi pada Tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai *Durbin Watson* adalah 1,889. Dengan signifikansi 5%, jumlah unit analisis 72 (n) dan variabel independen 6 ($k=6$), didapat nilai $d_l = 1,458$ dan $d_u = 1,801$. Nilai DW adalah 1,889 dan berada di antara d_u dan $4-d_u$. Artinya 1,889 lebih dari d_u (1,458) dan kurang dari $4-d_u$ (2,199), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada model, sehingga model regresi layak dipakai untuk analisis selanjutnya.

4.3.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dimana nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1. Maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. Berikut ini adalah hasil Uji Multikolonieritas :

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	INST	.867	1.154
	MANJ	.853	1.172
	KOMS	.387	2.585
	INDP	.930	1.075
	DIRK	.401	2.495
	AUDT	.918	1.090

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2013

Hasil uji multikolinearitas yang terdapat pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa model regresi yang dipakai untuk variabel-variabel independen penelitian tidak terdapat masalah multikolinearitas. Model tersebut terbebas dari masalah

multikolinieritas karena semua variabel menunjukkan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 dan mempunyai nilai VIF yang tidak lebih dari 10.

4.4 Analisis Regresi Berganda

4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Kinerja perbankan dapat dijelaskan oleh mekanisme GCG dapat dilihat pada Tabel 4.8 di bawah ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.516 ^a	.266	.198	1.03794

b. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2013

Hasil analisis regresi berganda dapat diketahui koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) adalah sebesar 0,198. Hal ini berarti 19,8% variabel kinerja perbankan yang diproksikan dengan ROA dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi dan komite audit, sedangkan sisanya, 80,2% dijelaskan oleh (variabel-variabel) faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti.

4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil Uji Statistik F dapat dilihat dari Tabel 4.9 berikut ini :

Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	25.343	6	4.224	3.921	.002 ^a
	Residual	70.025	65	1.077		
	Total	95.369	71			

a. Predictors: (Constant), AUDT, INDP, INST, MANJ, DIRK, KOMS

b. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2013

Hasil uji statistik F pada tabel 4.9 diatas mempunyai F-hitung sebesar 3,921 dengan nilai signifikansi 0,002. Hal ini berarti tingkat nilai signifikan berada di bawah signifikansi 5% atau lebih kecil dari 0,05. F-hitung sebesar 3,921 > F-tabel sebesar 2,24 yang artinya H_1 diterima maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme *GCG* secara bersama-sama (simultan) signifikan berpengaruh terhadap kinerja perbankan yang diprosikan dengan ROA.

4.4.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari uji parsial data dilihat pada tabel 4.10 berikut ini :

Tabel 4.10 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.536	1.121		2.262	.027
	INST	-.013	.006	-.256	-2.241	.028
	MANJ	-.002	.032	-.008	-.068	.946
	KOMS	-.062	.103	-.102	-.597	.552
	INDP	-.008	.011	-.078	-.706	.483
	DIRK	.224	.068	.556	3.310	.002
	AUDT	-.009	.010	-.092	-.826	.412

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2013

Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan (df) = $n-k-1$, dimana “n” adalah jumlah sampel, “k” adalah jumlah variabel independen, diperoleh $df = 65$ ($72 - 6 - 1 = 65$). Dengan $df = 65$ nilai t-tabel adalah 1.99656 sebagai hasil pengujian satu sisi. H_0 diterima bila t hitung $>$ t tabel dan mempunyai signifikansi $<$ 0,05 dan H_0 ditolak bila t hitung $<$ t tabel dan mempunyai signifikansi $>$ 0,05.

Hipotesis 2 menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif terhadap kinerja perbankan (ROA). Pada hasil output SPSS menunjukkan nilai t hitung = 2,241 dan nilai t tabel = 1.99656. Karena t hitung lebih besar dari t tabel diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar 0,028 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien kepemilikan institusional sebesar -0,013 yang artinya arah hubungan kepemilikan manajerial (INST) terhadap kinerja perbankan adalah negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif signifikan terhadap kinerja perbankan yang diprosikan dengan ROA, sehingga hipotesis 2 diterima.

Hipotesis 3 menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara negatif terhadap kinerja perbankan (ROA). Pada hasil output SPSS menunjukkan nilai t hitung = -0,068 dan nilai t tabel = 1.99656. Karena t hitung lebih kecil dari t tabel diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar 0,946 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien kepemilikan manajerial sebesar -0,002 yang artinya arah hubungan kepemilikan manajerial (MANJ) terhadap kinerja perbankan adalah negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara negatif terhadap kinerja perbankan namun tidak signifikan, sehingga hipotesis 3 ditolak.

Hipotesis 4 menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap kinerja perbankan (ROA). Pada hasil output SPSS menunjukkan nilai t hitung = 0,597 dan nilai t tabel = 1.99656. Karena t hitung lebih kecil dari t tabel diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar 0,552 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien ukuran dewan komisaris sebesar -0,092 yang artinya arah

hubungan ukuran dewan komisaris (KOMS) terhadap kinerja perbankan adalah negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara negatif terhadap kinerja perbankan namun tidak signifikan, sehingga hipotesis 4 ditolak.

Hipotesis 5 menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap kinerja perbankan (ROA). Pada hasil output SPSS menunjukkan nilai t hitung = 0,706 dan nilai t tabel = 1,99656. Karena t hitung lebih kecil dari t tabel diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar 0,483 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien komisaris independen sebesar -0,092 yang artinya arah hubungan ukuran dewan komisaris independen (INDP) terhadap kinerja perbankan adalah negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris independen berpengaruh secara negatif terhadap kinerja perbankan namun tidak signifikan, sehingga hipotesis 5 ditolak.

Hipotesis 6 menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh secara positif terhadap kinerja perbankan (ROA). Pada hasil output SPSS menunjukkan nilai t hitung = 3,310 dan nilai t tabel = 1,99656. Karena t hitung lebih besar dari t tabel diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien ukuran dewan direksi sebesar 0,224 yang artinya arah hubungan ukuran dewan direksi (DIRK) terhadap kinerja perbankan adalah positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perbankan, sehingga hipotesis 6 diterima.

Hipotesis 7 menyatakan bahwa komite audit berpengaruh secara positif terhadap kinerja perbankan (ROA). Pada hasil output SPSS menunjukkan nilai t

hitung = 0,826 dan nilai t tabel = 1.99656. Karena t hitung lebih kecil dari t tabel diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar 0,412 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien komite audit sebesar 0,009 yang artinya arah hubungan ukuran komite audit (AUDT) terhadap kinerja perbankan adalah positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan namun tidak signifikan, sehingga hipotesis 7 ditolak.

Berdasarkan hasil uji statistik parsial pada tabel 4.10 di atas, dilihat dari nilai B atau nilai koefisiennya, maka dapat diformulakan sebagai berikut :

$$\text{ROA} = 2,536 - 0,013 \text{ INST} - 0,002 \text{ MANJ} - 0,062 \text{ KOMS} - 0,008 \text{ INDP} + 0,224 \text{ DIRK} - 0,009 \text{ AUDT} + e$$

Model Regresi ini bermakna sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 2,536 artinya apabila nilai variabel INST (kepemilikan institusional), MANJ (kepemilikan manajerial), KOMS (dewan komisaris), INDP (komisaris independen), DIRK (dewan direksi) dan AUDT (komite audit) bernilai 0, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan lain dianggap tetap, maka ROA bernilai 2,536 atau bertambah sekitar 253,6%.
2. Variabel INST (kepemilikan institusional) menunjukkan terdapat pengaruh terhadap ROA yang berpola negatif sehingga semakin bertambah nilai INST, maka semakin kecil nilai ROA. Nilai koefisien INST sebesar (0,013) berarti bahwa setiap INST bertambah 1% maka ROA akan turun sebesar 1,3%.
3. Variabel MANJ (kepemilikan manajerial) menunjukkan terdapat pengaruh terhadap ROA yang berpola negatif sehingga semakin bertambah nilai MANJ,

maka semakin kecil nilai ROA. Nilai koefisien MANJ sebesar (0,002) berarti bahwa setiap MANJ bertambah 1% maka ROA akan turun sebesar 0,2%.

4. Variabel KOMS (dewan komisaris) menunjukkan terdapat pengaruh terhadap ROA yang berpola negatif sehingga semakin bertambah nilai KOMS, maka semakin kecil nilai ROA. Nilai koefisien KOMS sebesar (0,062) berarti bahwa setiap KOMS bertambah 1%, maka ROA akan turun sebesar 6,2%.
5. Variabel INDP (komisaris independen) menunjukkan terdapat pengaruh terhadap ROA yang berpola negatif sehingga semakin bertambah nilai INDP, maka semakin kecil nilai ROA. Nilai koefisien INDP sebesar (0,008) berarti bahwa setiap INDP bertambah 1% maka akan menurunkan sebesar 0,8%.
6. Variabel DIRK (dewan direksi) menunjukkan terdapat pengaruh terhadap ROA yang berpola positif sehingga semakin bertambah nilai DIRK, maka semakin besar nilai ROA. Nilai koefisien DIRK sebesar 0,224 berarti bahwa setiap DIRK bertambah 1% maka akan meningkatkan ROA sebesar 22,4%.
7. Variabel AUDT (komite audit) menunjukkan terdapat pengaruh terhadap ROA yang berpola negatif sehingga semakin bertambah nilai AUDT, maka semakin kecil nilai ROA. Nilai koefisien AUDT sebesar (0,009) berarti bahwa setiap AUDT bertambah 1% maka akan mengurangi ROA sebesar 0,9%.

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Hipotesis Keseluruhan

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Mekanisme <i>good corporate governance</i> secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan	H1 diterima
H2	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan	H2 diterima
H3	Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan	H3 ditolak
H4	Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan	H4 ditolak
H5	Ukuran komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan	H5 ditolak
H6	Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan	H6 diterima
H7	Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan	H7 ditolak

4.5 Pembahasan

Dalam pembahasan ini akan diungkap tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi dan komite audit terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA.

4.5.1 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian

Di dalam pembahasan ini, akan diulas secara umum kriteria penilaian untuk semua variabel penelitian.

1. Kinerja (ROA)

Nilai rata rata ROA perbankan nasional tergolong cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya cukup efisien sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang

besar. Semakin tinggi nilai ROA menunjukkan manajemen efisien dalam menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan penghasilan

2. Kepemilikan Institusional

Nilai rata-rata kepemilikan institusional di dalam perusahaan perbankan nasional tergolong banyak. Hal ini dikarenakan pemegang saham dari pihak institusi memiliki kepemilikan saham yang banyak. Dengan kepemilikan institusional yang mayoritas menyebabkan kemampuan untuk memonitor manajemen lebih besar. Kepemilikan institusional mayoritas menyebabkan dalam pengambilan keputusan pemegang saham mayoritas lebih dominan dan unggul memiliki kontrol yang kuat di dalam perusahaan.

3. Variabel Kepemilikan Manajerial

Nilai rata-rata kepemilikan manajerial di dalam perusahaan perbankan nasional tergolong kecil. Hal tersebut dikarenakan banyak anggota dewan yang tidak memiliki saham di dalam perusahaan. Dengan kepemilikan manajerial yang minoritas menyebabkan para manajer tunduk terhadap para pemegang saham mayoritas. Hal ini mengakibatkan ketika dalam pengambilan keputusan para pemegang saham minoritas mungkin saja akan diabaikan oleh pemegang saham mayoritas yang lebih dominan di dalam perusahaan.

4. Ukuran Dewan Komisaris

Nilai rata-rata ukuran dewan komisaris di dalam perusahaan perbankan nasional tergolong cukup banyak. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi dewan direksi agar menerapkan GCG di dalam perusahaan. Namun rata-rata jumlah komisaris sebanyak 5 orang sedangkan rata-rata jumlah dewan direksi

sebanyak 7 orang. Sehingga rata-rata jumlah dewan komisaris masih jauh dibawah jumlah dewan direksi. Hal ini menyebabkan pengawasan menjadi kurang maksimal.

5. Komisaris Independen

Nilai rata-rata komisaris independen di dalam perusahaan perbankan nasional tergolong cukup. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia minimal komisaris independen sebanyak 50%. Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak memiliki afiliasi terhadap perusahaan. Pengangkatan dewan komisaris independen harus berdasarkan *fit and proper test* agar memiliki independensi yang baik.

6. Ukuran Dewan Direksi

Nilai rata-rata ukuran dewan direksi di dalam perusahaan perbankan nasional tergolong banyak. Dewan direksi yang banyak akan membuat tugas-tugas yang ada didalam perusahaan cepat selesai karena banyaknya anggota direksi menjalankan tugasnya di dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan para direksi melakukan tugasnya dengan baik.

7. Komite Audit

Nilai rata-rata komite audit di dalam perusahaan perbankan nasional tergolong banyak. Selain itu berdasarkan peraturan Bank Indonesia jumlah minimal sebesar 51% dari jumlah komite audit. Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian internal.

4.5.2 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

1. Mekanisme *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan

Hipotesis pertama (H1) diterima. Mekanisme *good corporate governance* secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Semakin baik penerapan GCG dalam perbankan maka kinerja perbankan akan meningkat. Dengan diterapkannya mekanisme GCG maka kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh manajer akan berkurang dengan adanya pengawasan dari dewan komisaris sehingga manajer bekerja secara efektif dan efisien sehingga dapat menurunkan biaya modal dan mampu meminimalkan risiko. Setiap keputusan manajemen diambil didasarkan pada kepentingan pemegang saham dan sumber daya perusahaan yang ada digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pertumbuhan dan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini akan menghasilkan profitabilitas yang tinggi.

Profitabilitas yang tinggi akan berdampak pada laba per saham yang meningkat sehingga saham perusahaan banyak diminati investor. Investor akan memperoleh pendapatan (*return*) yang tinggi jika profitabilitas yang dihasilkan perusahaan tinggi. Mekanisme GCG juga akan membuat investor memberikan respon yang positif terhadap kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian penerapan GCG di perusahaan mempengaruhi secara positif kinerja perusahaan.

2. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan

Hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil temuan menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan yang diproksikan dengan ROA. Hal ini berarti semakin banyak jumlah kepemilikan institusional menyebabkan kinerja perbankan menurun. Berdasarkan analisis deskriptif, nilai rata-rata kepemilikan institusional di dalam perusahaan perbankan nasional tergolong banyak. Hal ini dikarenakan pemegang saham dari pihak institusi memiliki kepemilikan saham yang besar. Kepemilikan institusional yang besar merupakan pemilik mayoritas. Pemilik mayoritas memiliki kecenderungan untuk mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Kepemilikan institusional yang semakin besar juga mengakibatkan kontrol eksternal yang lebih besar di dalam suatu perusahaan. Semakin besar kontrol eksternal akan menyebabkan kebijakan yang diambil akan cenderung mengikuti kebijakan dari institusi eksternal.

Selain itu, kekuasaan pemegang saham mayoritas cukup berpengaruh sehingga sangat mungkin digunakan untuk memutuskan sesuatu yang menguntungkan kepentingan pribadinya dan kepentingan tersebut bertentangan dengan kepentingan investor atau *stakeholders* yang lain. Pemegang saham besar mungkin saja membuat keputusan untuk membagikan dividen hanya pada dirinya sendiri dan pemegang saham minoritas yang lain tidak mendapat dividen tersebut karena memiliki kontrol yang kuat.

3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan

Hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hasil temuan menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan yang diprosikan dengan ROA. Berdasarkan analisis deskriptif, nilai rata-rata kepemilikan manajerial di dalam perusahaan perbankan nasional tergolong kecil. Hal tersebut dikarenakan banyak anggota dewan yang tidak memiliki saham di dalam perusahaan. Dengan kepemilikan manajerial yang minoritas menyebabkan para manajer tunduk kepada para pemegang saham mayoritas. Hal ini mengakibatkan ketika dalam pengambilan keputusan para pemegang saham minoritas mungkin saja akan diabaikan diabaikan oleh pemegang saham mayoritas yang memiliki kontrol yang kuat di dalam perusahaan.

Selain itu, ketika dalam pengambilan keputusan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham, para pemegang saham minoritas mungkin tidak dilibatkan karena jumlah kepemilikan yang kecil sehingga dalam pengambilan keputusan akan lebih didominasi oleh pemilik saham mayoritas. Hal ini mengakibatkan para pemilik saham minoritas tidak banyak memberikan suara dalam pengambilan keputusan. Padahal sesungguhnya manajer lebih banyak mengetahui informasi keuangan di dalam perusahaan dibanding para pemilik perusahaan. Hal ini menyebabkan kepemilikan manajerial tidak pengaruh terhadap kinerja perusahaan karena pengambilan keputusan akan didominasi oleh pemilik mayoritas. Sebaiknya kepemilikan saham manajerial perlu ditambah agar mensejajarkan pemilik saham manajerial dengan pemilik saham mayoritas. Selain itu, pemegang saham mayoritas tidak boleh mengabaikan para pemilik saham manajerial yang

merupakan pemilik minoritas karena pihak manajer lebih banyak mengetahui keadaan finansial perusahaan dibanding pemilik.

4. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan

Hipotesis keempat (H4) ditolak. Hasil temuan menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan. Berdasarkan statistik deskriptif, nilai rata-rata ukuran dewan komisaris cukup banyak. Namun rata-rata jumlah dewan komisaris masih dibawah jumlah dewan direksi. Ukuran anggota dewan komisaris yang masih dibawah jumlah dewan direksi membuat tugas pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap manajemen perusahaan lebih sulit yang nantinya berdampak pula pada kinerja perusahaan.

Selain itu beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan proses pemilihan dewan komisaris yang kurang demokratis dimana kandidat dewan komisaris sering dipilih oleh manajemen sehingga setelah terpilih tidak berani memberi kritik terhadap manajemen. Hal itu mengakibatkan pengawasan yang dilakukan dewan komisaris tidak obyektif dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen. Sebaiknya ukuran dewan komisaris ditambah sebanyak jumlah dewan direksi harus sama agar pengawasan menjadi lebih efektif. Hal ini dikarenakan fungsi utama dewan komisaris adalah mengawasi kinerja dewan direksi.

5. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan

Hipotesis kelima (H5) ditolak. Hasil temuan menunjukkan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian Sanda *et al.* (2005) dan Veronica dan Utama (2005) menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan.

Berdasarkan statistik deskriptif, jumlah komisaris independen cukup banyak. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan disebabkan karena tugas komisaris independen sama dengan dewan komisaris lainnya yaitu untuk mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan dan memberikan nasihat-nasihat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam prakteknya tugas tersebut lalai dilaksanakan dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh komisaris termasuk komisaris independen.

Alasan lain dikemukakan Veronica dan Utama (2005) yaitu dikarenakan pengangkatan komisaris independen mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja dan tidak dimaksudkan untuk menegakkan *good corporate governance* dalam perusahaan. Tetapi jika pengangkatannya belum dilandasi kebutuhan perusahaan tapi hanya sebatas pemenuhan regulasi,

6. Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan

Hipotesis keenam (H6) diterima. Hasil temuan menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan yang diprosikan dengan ROA. Berdasarkan statistik deskriptif, rata-rata jumlah dewan direksi dalam perusahaan perbankan cukup banyak. Jumlah dewan direksi yang banyak akan meningkatkan kinerja perbankan. Hal ini dikarenakan sebagian besar anggota direksi tidak memiliki saham yang besar di dalam perusahaan sehingga

dewan direksi akan lebih independen dalam menjalankan perusahaan. Hal terpenting adalah direktur harus bersikap independen ketika perusahaan melakukan tugas-tugas yang diembannya sebagai agen dari pemilik perusahaan. Jumlah direksi yang banyak akan membuat kinerja lebih baik karena jumlah sumber daya yang banyak sehingga tugas-tugas bisa diselesaikan dengan cepat.

7. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan

Hipotesis ketujuh (H7) ditolak. Hasil temuan menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan yang diprosikan dengan ROA. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Veronica dan Utama (2005) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Komite audit diketuai oleh satu komisaris independen. Selain itu hanya satu komite audit yang memiliki kemampuan bidang akuntansi dan keuangan. Ukuran perusahaan yang besar akan memiliki kompleksitas bisnis yang tinggi, komite audit akan terancam mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya, sehingga kerja komite audit menjadi kurang efektif. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan audit yang berasal dari eksternal.

Beberapa penelitian sebelumnya Veronica dan Utama (2005) menyatakan bahwa ketika pemilihan anggota komite audit hanya berdasarkan kedudukan kekerabatan sehingga menyebabkan mekanisme pemantauan terhadap dewan direksi menjadi kurang maksimal. Sehingga fungsi komite audit belum berjalan optimal karena di dalam posisi tersebut komite audit berada di dalam posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

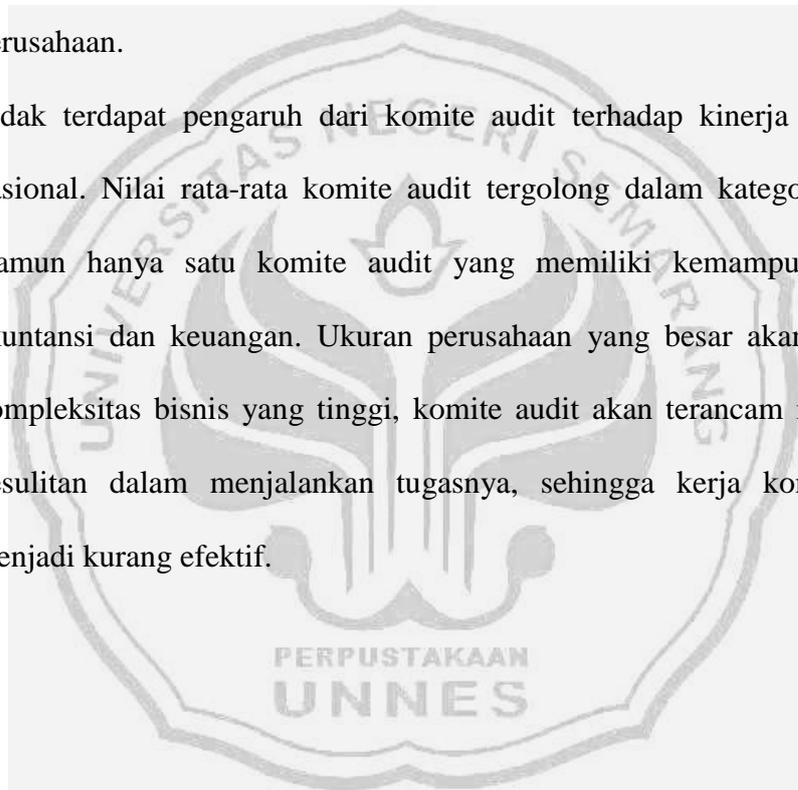
1. Terdapat pengaruh positif dari mekanisme *GCG* terhadap kinerja perbankan nasional. Nilai rata-rata ROA dengan diterapkannya mekanisme *GCG* cukup baik. Tindakan tersebut menghasilkan rata-rata rasio profitabilitas yang cukup tinggi. Karena kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh manajer berkurang, maka manajer akan bekerja secara efektif dan efisien, sehingga mampu meminimalkan risiko dan biaya modal pun otomatis menurun.
2. Terdapat pengaruh negatif dari kepemilikan institusional terhadap kinerja perbankan nasional. Nilai rata-rata kepemilikan institusional tergolong besar. Kepemilikan institusional mayoritas memiliki kecenderungan untuk berkompromi atau berpihak kepada manajemen dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Kepemilikan institusional yang semakin besar juga mengakibatkan kontrol eksternal yang lebih besar di dalam suatu perusahaan.
3. Tidak terdapat pengaruh dari kepemilikan manajerial terhadap kinerja perbankan nasional. Nilai rata-rata menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dalam perusahaan sangat kecil. Dengan kepemilikan manajerial

yang minoritas menyebabkan para manajer tunduk terhadap para pemegang saham mayoritas. Hal ini mengakibatkan ketika dalam pengambilan keputusan para pemegang saham minoritas mungkin saja akan diabaikan diabaikan oleh pemegang saham mayoritas yang memiliki kontrol yang kuat di dalam perusahaan.

4. Tidak terdapat pengaruh dari ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perbankan nasional. Nilai rata-rata ukuran dewan komisaris menunjukkan kriteria ukuran dewan komisaris cukup banyak. Namun anggota dewan komisaris masih di bawah jumlah dewan direksi sehingga membuat tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan lebih sulit yang nantinya berdampak pula pada kinerja perusahaan yang semakin menurun.
5. Tidak terdapat pengaruh dari komisaris independen terhadap kinerja perbankan nasional. Nilai rata-rata komisaris independen cukup banyak. Namun pada dasarnya komisaris independen memiliki tugas yang sama dengan dewan komisaris. Tugas dewan komisaris adalah mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan dan memberikan nasihat-nasihat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam praktiknya tugas tersebut lalai dilaksanakan dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh komisaris termasuk komisaris independen.
6. Terdapat pengaruh positif dari ukuran dewan direksi terhadap kinerja perbankan nasional. Nilai rata-rata ukuran dewan direksi dalam perusahaan perbankan termasuk dalam kategori cukup banyak. Jumlah

dewan direksi yang banyak akan meningkatkan kinerja perbankan. Hal ini dikarenakan jumlah direksi yang banyak akan membuat kinerja lebih baik karena jumlah sumber daya yang banyak sehingga tugas-tugas bisa diselesaikan dengan cepat. Selain itu sebagian besar anggota direksi tidak memiliki saham (saham manajerial) yang besar di dalam perusahaan sehingga dewan direksi akan lebih independen dalam menjalankan perusahaan.

7. Tidak terdapat pengaruh dari komite audit terhadap kinerja perbankan nasional. Nilai rata-rata komite audit tergolong dalam kategori banyak. Namun hanya satu komite audit yang memiliki kemampuan bidang akuntansi dan keuangan. Ukuran perusahaan yang besar akan memiliki kompleksitas bisnis yang tinggi, komite audit akan terancam mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya, sehingga kerja komite audit menjadi kurang efektif.



5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan institusional dalam perbankan sebaiknya dikurangi agar kontrol eksternal di dalam perusahaan dapat berkurang.
2. Sebaiknya dalam pengambilan keputusan perlu memperhatikan suara pemilik saham manajerial karena manajer lebih banyak mengetahui informasi perusahaan.
3. Sebaiknya ukuran dewan komisaris di dalam perusahaan ditambah sebanyak jumlah dewan direksi agar pengawasan menjadi lebih efektif.
4. Ukuran komisaris independen paling sedikit setengah dari jumlah dewan komisaris tetapi pengangkatan komisaris independen perusahaan tidak hanya sebatas pemenuhan regulasi saja.
5. Komite audit sebaiknya memiliki kemampuan bidang akuntansi dan keuangan yang baik karena perusahaan yang besar akan memerlukan pengawasan yang besar.
6. Bagi penelitian selanjutnya bisa menggunakan periode penelitian yang berbeda karena Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang baru yaitu peraturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8 /PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum

Daftar Pustaka

- Amindoni, Ayomi. “Kejahatan Perbankan Terjadi karena GCG Lemah”. Dalam Media Indonesia.com. Diakses Rabu, 22 Juni 2011 14:09 WIB
- Amyulianthy, Rafriny. 2012. “Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Indonesia”. Dalam *Jurnal Liquidity*, Volume 1. No. 2, Juli-Desember 2012, Hal. 91-98: Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila
- Andarini, Puteri Wahyu., dan Januarti, Indira.2010. “Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris dan Perusahaan Terhadap Pengungkapan Risk Management Committee Pada Perusahaan Go Public Indonesia”. Dalam *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- Aprina, Desi. 2012. “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan yang Diukur Menggunakan Economic Value Added”. Dalam *Jurnal akuntansi*. Jurusan Akuntansi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
- Arbaina, Endang Siti. 2012. “Penerapan Good Corporate Governance pada Perbankan di Indonesia”. Dalam *Jurnal Akuntansi Unesa*, Volume 1, No 1. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Arifin, Agus Zainul. 2005. “The Ownership Structure On The Capital Structure And The Firm Performance”. *Accounting Journal*. Jakarta: Faculty of Economics Tarumanagara University.
- Beasley, Mark S., 1996. “An Empirical Analysis of The Relation Between The Board of Director Composition and Financial Statement Fraud”. *The Accounting Review*, Volume 71, No 4, Oktober: 443-465
- Beiner, S.,W. Drobetz, F. Schmid dan H. Zimmermann, 2003. “ Is Board Size An Independent Corporate Governance Mechanism?”. *Working Paper* No. 89, National Centre of competence in Research Financial Valuation and Risk Management.
- Belkhir, Mohamed. 2005. “Board structure, Ownership structure, and Firm performance: Evidence from Banking”. Laboratoire d’Economie d’Orléans, University of Orléans – France
- Boediono, Gideon Sb. 2005. “Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur”. Dalam *Simposium Nasional Akuntansi VIII* Solo 15 – 16 September 2005.

- Brigham, Eugene F. and Joel F. Houston. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Budiarti, Isnar. 2010. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Dunia Perbankan". Dalam *Majalah Ilmiah Unikom*, Volume 1.8, no. 2
- Cadbury report. 1992 *The Financial Aspects of Corporate Governance*. The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd. ISBN 0 85258 913
- Che Haat, Mohd. H., R. Rahman, and S. Mahenthiran. 2008. "Transparency and Performance of Malaysian Companies. Management". Dalam *Auditing Journal*, Volume. 23(8), Page. 744-778. Butler University, smsmahenth@butler.edu
- Chtourou, L., S. Marrachi., J. Bedard, 2001. "Corporate Governance and Earning Management". Available online at www.ssrn.com.
- Darmawati, dkk. 2004. "Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan". Dalam *Simposium Nasional Akuntansi VII*. Denpasar-Bali, 2-3 Desember 2004
- Dewayanto, Totok. 2010. "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008)". Dalam *Fokus Ekonomi*, Volume 5, No. 2 Desember 2010 : 104-123
- Faisal. 2005. "Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Volume 8, No.2, Hal. 175-190.
- Firmansyah, 2006. "Analisis Hubungan Struktur Kepemilikan Dengan Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Persero dan Perusahaan Perbankan Swasta Nasional Go Publik". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. (Dipublikasikan)
- FGCI. "What is Corporate Governance". Sumber: www.fcgi.org, diakses Jumat 23 November 2012
- Ghozali, Imam. 2006. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2009. *Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

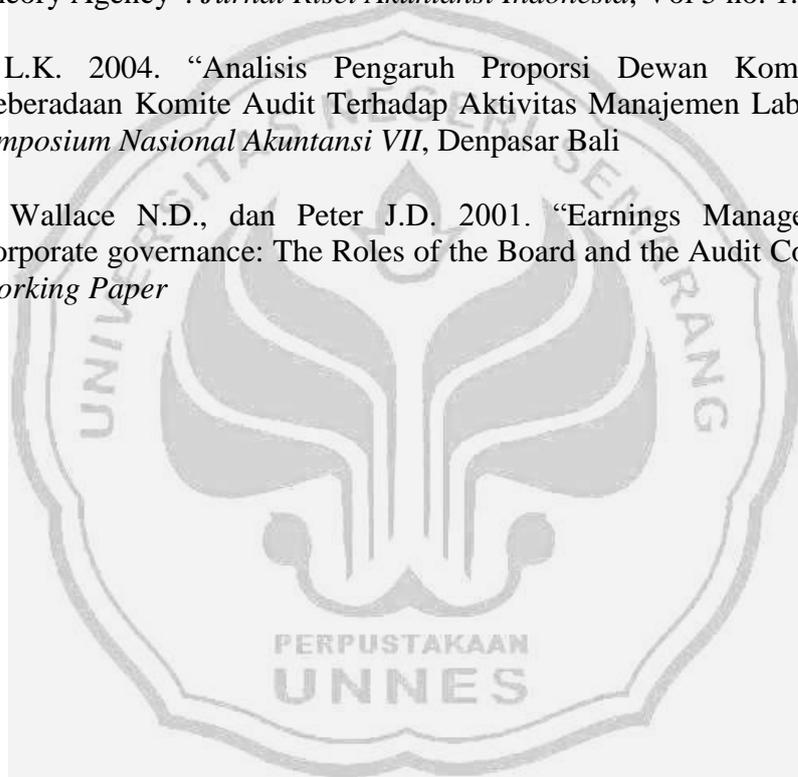
- Gujarati, Damodar. 1991. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga. Terjemahan: Sumarno Zain
- Guna, Welvin I dan Arleen Herawaty. 2010. "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit Dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba". Dalam *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* Volume 12, No. 1, April 2010, Hal. 53 – 68
- Hardiningsih, Pancawati. 2010. "Pengaruh Independensi, Corporate Governance, Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan". Dalam *Kajian Akuntansi*, Volume 2 No. 1, Pebruari 2010, Hal: 61 – 76. ISSN : 1979-4886
- Haryani dkk. 2011. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja: Transparansi Sebagai Variabel Intervening". Dalam *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 21-22 Juli 2011
- Hermalin, Benjamin E. and Michael S. Weisbach. 2003. "Boards of Directors as an Endogenously Determined Institution: A Survey of the Economic Literature. *Economic Policy Review*/ April 2003. FRBNY
- Jensen, Michael C. and William H. Meckling. 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure". *Journal of Financial Economics* 3 (1976) 305-360. Q North-Holland Publishing Company
- Kaihatu, Thomas S.. 2006. "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia". Dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume.8, No. 1, Maret 2006: 1-9. Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi – Universitas Kristen Petra.
- Klapper, Leora F. and Inessa Love. 2002. "Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in Emerging Markets". *World Bank Policy Research Working Paper 2818*, April 2002
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta
- Kompas.com. "Inilah 9 Kasus Kejahatan Perbankan". Diakses Selasa, 3 Mei 2011, 09:44 WIB
- Lastanti, Hexana Sri. 2004. "Hubungan Struktur Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar : Peran Akuntan dalam Membangun Good Corporate Governance." Dalam *Konferensi Nasional Akuntansi*

- Macey, Jonathan R. and Maureen O'Hara .2003 .”The Corporate Governance of Banks”. *Economic Policy Review* / April 2003. FRBNY
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFY Yogyakarta
- Mawardi, Wisnu. 2004. “Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum dengan Total Asset Kurang Dari 1 Trilyun)”. *Masters thesis*, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Nasution, MARIHOT dan Doddy Setiawan. 2007. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia”. Dalam *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 2007*. Fakultas Ekonomi Unhas Makasar, 26-28 Juli 2007
- Naja, H.R. Daeng. 2007. *Good Corporate Governance pada Lembaga Perbankan*. Yogyakarta: Medpress (Anggota IKAPI)
- Nuswandari, Cahyani. 2009. “Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta”. Dalam *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, September 2009, Volume. 16, Halaman. 70 - 84 No.2 ISSN: 1412-3126. Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) PT Bursa Efek Indonesia.versi 1.0. 2011*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum*
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum*
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/14/PBI/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Pelaksanan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum*
- Pratolo, Suryo. 2007. “Good Corporate Governance dan Kinerja BUMN di Indonesia: Aspek Audit Manajemen Dan Pengendalian Intern Sebagai Variabel Eksogen Serta Tinjauannya Pada Jenis Perusahaan”. Dalam *Simposium Nasional Akuntansi X* . Unhas Makasar

- Praptiningsih, Maria. 2009.” Corporate Governance and Performance of Banking Firms: Evidence from Indonesia, Thailand, Philippines, and Malaysia”. Dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 11, No. 1, Maret 2009: 94-108. Department of Business Management. Faculty of Economics Petra Christian University. Surabaya. Indonesia
- Puspitasari, Filia dan Endang Ernawati. 2010. “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha”. Dalam *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, Tahun 3, No. 2, Agustus 2010. Universitas Surabaya
- Rajgopal, S., Venkatachalam, M., and Jiambalvo, J..1999. “Is Institutional Ownership Associated with Earnings Management and The Extent to which Stock Price Reflect Future Earnings?”. Working Paper
- Raffles. 2011. Penerapan Good Corporate Governance Dalam Kaitannya Dengan Tata Kelola dan Pengembangan Kelembagaan Perbankan. Dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2, No 3. *Original Source*: <http://online-journal.unja.ac.id>
- Sari, Irmala. 2010. “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Pengembangan Fungsi Pengawasan Menuju Good Corporate Governance pada Milenium baru*. Makalah disajikan pada Seminar yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPAI), Graha Sucofindo, Jakarta pada Tanggal 29 September 1999, tidak diterbitkan.
- Surat Edaran Direksi PT BEJ No.SE-008/BEJ/12-2001 Tahun 2001*
- Purwantini, V. Titi. 2008. “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan”. STIE AUB Surakarta
- Pujiati, Diyah dan Erman Widanar. 2009. “Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan: Keputusan Keuangan sebagai Variabel Intervening”. *Jurnal Ekonomi Bisnis & Akuntansi Ventura*. Volume 12, No 1, Hal 71-86, April 2009
- Sama’ni. 2008. “Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2004 – 2007”. *Thesis*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

- Sayidah, Nur. 2007. "Pengaruh Kualitas *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan Publik (Studi Kasus Peringkat 10 Besar CGPI Tahun 2003, 2004, 2005)". *JAAI* Volume 11, No. 1, Juni 2007: 1 – 19. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo.
- Sofriza Syofyan, 2002, "Pengaruh Struktur Pasar Terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia". *Media Riset Bisnis & Manajemen*, Vol. 2 No.3 Desember 2002
- Siregar, S. V., dan S. Utama. 2005. "Pengaruh Struktur Kepemilikan, ukuran Perusahaan, dan Praktek *Corporate Governance* terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management)". Dalam *Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo, 15 – 16 September 2005*.
- Sulistiyanto, H. Sri, dan Haris Wibisono. 2003. "Good *Corporate Governance*: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia". Dimuat di *Jurnal Widya Warta*, No.2 Tahun XXVI/Juli 2003, ISSN: 0854-1981. Semarang: Fakultas Ekonomi Unika Soegijapranata.
- Susiana dan arleen herawaty. 2007. "Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme *Corporate Governance*, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan". *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar 26-28 Juli 2007*
- Suranta, Eddy., P. Midiastuty. 2004. "Pengaruh Good *Corporate Governance* Terhadap Praktik Manajemen Laba." Konferensi Nasional Akuntansi 2004.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana
- Syamsuddin dan M. Abdul Mukhyi. 2007. "Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Devisa dan Bank Non Devisa di Indonesia". *Jurnal Kinerja Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
- Turley, Stuart and Mahbub Zaman. 2004. "The *Corporate Governance* Effects of Audit Committees". *Journal of Management and Governance*. No. 8: 305–332, 2004. School of Accounting and Finance, University of Manchester, Manchester M13 9PL, UK. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*
- Undang-Undang Nonor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*

- Utama, I made Karya dan Komang Ayu Maha Dewi. 2012. “Analisis Camels: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, Volume. 8, No.2. Juli 2012. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Veithzal Rivai & Ahmad Fawzi Mohd Basri. 2005. *Performance Appraisal Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahidahwati, 2002. “Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Kebijakan Hutang Perusahaan : *Sebuah Perspektif Theory Agency*”. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol 5 no. 1.
- Wedari, L.K. 2004. “Analisis Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit Terhadap Aktivitas Manajemen Laba”, Dalam *Simposium Nasional Akuntansi VII*, Denpasar Bali
- Xie, B., Wallace N.D., dan Peter J.D. 2001. “Earnings Management and Corporate governance: The Roles of the Board and the Audit Committee”. *Working Paper*



LAMPIRAN



Lampiran 1

DAFTAR ROA PERUSAHAAN PEBANKAN TAHUN 2009 - 2011

No	Kode	Nama Perusahaan	ROA (%)		
			2009	2010	2011
1	AGRO	Bank Agroniaga	0,15	0,63	1,29
2	BACA	Bank Capital Indonesia	0,85	0,66	0,73
3	BAEK	Bank Ekonomi Raharja	2,09	1,84	1,17
4	BBCA	Bank Central Asia	3,17	3,29	3,57
5	BBNI	Bank Negara Indonesia	1,51	2,21	2,49
6	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan	1,06	1,20	1,40
7	BDMN	Bank Danamon Indonesia	2,50	2,40	3,39
8	BKSW	Bank Kesawan	0,27	4,45	0,40
9	BMRI	Bank Mandiri	2,74	3,11	2,99
10	BNBA	Bank Bumi Arta	1,71	1,37	1,92
11	BNGA	Bank CIMB Niaga	2,02	2,36	2,63
12	BNII	Bank Internasional Indonesia	0,06	1,05	1,04
13	BNLI	Bank Permata	1,37	1,69	1,54
14	BSWD	Bank Swadesi	3,29	3,06	3,13
15	BTPN	Bank Tabungan Pensiun Nasional	2,79	3,27	3,90
16	BVIC	Bank Victoria Internasional	0,85	1,29	2,03
17	INPC	Bank Artha Graha Investama	0,42	0,69	0,66
18	MAYA	Bank Mayapada Internasional	0,78	1,05	1,78
19	MCOR	Bank Windu Kentjana Internasional	0,82	0,87	0,75
20	MEGA	Bank Mega	1,61	2,02	1,92
21	PNBN	Bank Pan Indonesia	1,81	1,74	2,19
22	SDRA	Bank Himpunan Saudara 1906	2,13	2,51	2,40
23	BABP	Bank ICB Bumi Putra	0,16	0,20	-1,71
24	BBRI	Bank Rakyat Indonesia	3,12	3,69	3,99

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Lampiran 2

Daftar Presentase Kepemilikan Institusional Perusahaan Perbankan
Periode Tahun 2009 - 2011

No	Kode	Nama Perusahaan	Kepemilikan Institusional		
			2009	2010	2011
1	AGRO	Bank Agroniaga	96,73	96,75	93,78
2	BACA	Bank Capital Indonesia	61,37	77,68	56,54
3	BAEK	Bank Ekonomi Raharja	98,96	98,96	98,94
4	BBCA	Bank Central Asia	47,15	47,15	47,15
5	BBNI	Bank Negara Indonesia	92,34	97,55	97,55
6	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan	90,68	90,51	90,51
7	BDMN	Bank Danamon Indonesia	67,63	67,42	67,37
8	BKSW	Bank Kesawan	76,08	70,14	91,45
9	BMRI	Bank Mandiri	98,46	96,91	94,55
10	BNBA	Bank Bumi Arta	90,9	90,9	91,9
11	BNGA	Bank CIMB Niaga	93,88	97,93	97,94
12	BNII	Bank Internasional Indonesia	97,52	97,38	97,02
13	BNLI	Bank Permata	89	89	89
14	BSWD	Bank Swadesi	93,12	93,09	93,12
15	BTPN	Bank Tabungan Pensiun Nasional	71,61	59,68	59,68
16	BVIC	Bank Victoria Internasional	55,16	48,74	53,97
17	INPC	Bank Artha Graha Investama	52,62	52,62	52,62
18	MAYA	Bank Mayapada Internasional	91,56	92,02	92,02
19	MCOR	Bank Windu Kentjana Internasional	88,24	67,11	95,72
20	MEGA	Bank Mega	57,82	57,82	57,82
21	PNBN	Bank Pan Indonesia	84,4	83,5	84,28
22	SDRA	Bank Himpunan Saudara 1906	10,4	11,03	11,03
23	BABP	Bank ICB Bumi Putra	73,06	82,71	86,77
24	BBRI	Bank Rakyat Indonesia	98,4	98,7	98,95

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Lampiran 3

Daftar Presentase Kepemilikan Manajerial Perusahaan Perbankan
Periode Tahun 2009 - 2011

No	Kode	Nama Perusahaan	Kepemilikan Manajerial		
			2009	2010	2011
1	AGRO	Bank Agroniaga	0,00	0,00	0,00
2	BACA	Bank Capital Indonesia	21,70	0,00	4,87
3	BAEK	Bank Ekonomi Raharja	0,00	0,00	0,00
4	BBCA	Bank Central Asia	0,28	0,28	0,28
5	BBNI	Bank Negara Indonesia	0,04	0,03	0,03
6	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan	0,00	0,00	0,00
7	BDMN	Bank Danamon Indonesia	0,16	0,16	0,00
8	BKSW	Bank Kesawan	0,00	0,00	0,00
9	BMRI	Bank Mandiri	0,60	0,59	0,54
10	BNBA	Bank Bumi Arta	0,00	0,00	0,00
11	BNGA	Bank CIMB Niaga	0,00	0,00	0,00
12	BNII	Bank Internasional Indonesia	0,00	0,00	0,00
13	BNLI	Bank Permata	0,00	0,00	0,00
14	BSWD	Bank Swadesi	1,61	1,61	1,61
15	BTPN	Bank Tabungan Pensiun Nasional	0,82	0,85	0,86
16	BVIC	Bank Victoria Internasional	17,14	16,10	13,47
17	INPC	Bank Artha Graha Investama	0,00	0,00	0,00
18	MAYA	Bank Mayapada Internasional	0,00	0,00	0,00
19	MCOR	Bank Windu Kentjana Internasional	0,46	1,70	5,07
20	MEGA	Bank Mega	0,00	0,00	0,00
21	PNBN	Bank Pan Indonesia	0,00	0,00	0,00
22	SDRA	Bank Himpunan Saudara 1906	1,00	0,75	0,00
23	BABP	Bank ICB Bumi Putra	0,00	0,00	0,00
24	BBRI	Bank Rakyat Indonesia	0,56	0,46	0,42

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Lampiran 4

Daftar Ukuran Dewan Komisaris Perusahaan Perbankan

Periode Tahun 2009 - 2011

No	Kode	Nama Perusahaan	Dewan Komisaris		
			2009	2010	2011
1	AGRO	Bank Agroniaga	3	2	4
2	BACA	Bank Capital Indonesia	3	3	3
3	BAEK	Bank Ekonomi Raharja	4	4	4
4	BBCA	Bank Central Asia	5	5	5
5	BBNI	Bank Negara Indonesia	7	7	7
6	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan	5	5	5
7	BDMN	Bank Danamon Indonesia	8	8	8
8	BKSW	Bank Kesawan	3	3	6
9	BMRI	Bank Mandiri	8	7	9
10	BNBA	Bank Bumi Arta	3	2	3
11	BNGA	Bank CIMB Niaga	6	8	8
12	BNII	Bank Internasional Indonesia	6	7	7
13	BNLI	Bank Permata	8	9	9
14	BSWD	Bank Swadesi	6	5	5
15	BTPN	Bank Tabungan Pensiun Nasional	6	5	6
16	BVIC	Bank Victoria Internasional	3	3	3
17	INPC	Bank Artha Graha Investama	6	6	6
18	MAYA	Bank Mayapada Internasional	4	4	6
19	MCOR	Bank Windu Kentjana Internasional	3	4	3
20	MEGA	Bank Mega	3	3	3
21	PNBN	Bank Pan Indonesia	4	4	4
22	SDRA	Bank Himpunan Saudara 1906	3	2	4
23	BABP	Bank ICB Bumi Putra	5	6	5
24	BBRI	Bank Rakyat Indonesia	7	7	6

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Lampiran 5

Daftar Presentase Komisaris Independen Perusahaan Perbankan
Periode Tahun 2009 - 2011

No	Kode	Nama Perusahaan	Persentase (%)		
			2009	2010	2011
1	AGRO	Bank Agroniaga	66,7	50,0	50,0
2	BACA	Bank Capital Indonesia	66,7	66,7	66,7
3	BAEK	Bank Ekonomi Raharja	50,0	50,0	50,0
4	BBCA	Bank Central Asia	60,0	60,0	60,0
5	BBNI	Bank Negara Indonesia	57,1	57,1	57,1
6	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan	60,0	60,0	60,0
7	BDMN	Bank Danamon Indonesia	50,0	50,0	62,5
8	BKSW	Bank Kesawan	66,7	66,7	50,0
9	BMRI	Bank Mandiri	37,5	42,9	44,4
10	BNBA	Bank Bumi Arta	33,3	100,0	66,7
11	BNGA	Bank CIMB Niaga	50,0	50,0	50,0
12	BNII	Bank Internasional Indonesia	50,0	57,1	57,1
13	BNLI	Bank Permata	50,0	55,6	55,6
14	BSWD	Bank Swadesi	50,0	60,0	60,0
15	BTPN	Bank Tabungan Pensiun Nasional	50,0	40,0	50,0
16	BVIC	Bank Victoria Internasional	66,7	66,7	66,7
17	INPC	Bank Artha Graha Investama	50,0	50,0	50,0
18	MAYA	Bank Mayapada Internasional	50,0	50,0	50,0
19	MCOR	Bank Windu Kentjana Internasional	33,3	50,0	33,3
20	MEGA	Bank Mega	66,7	66,7	66,7
21	PNBN	Bank Pan Indonesia	50,0	50,0	50,0
22	SDRA	Bank Himpunan Saudara 1906	33,3	50,0	50,0
23	BABP	Bank ICB Bumi Putra	80,0	50,0	80,0
24	BBRI	Bank Rakyat Indonesia	57,1	71,4	50,0

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Lampiran 6

Daftar Ukuran Dewan Direksi Perusahaan Perbankan
Periode Tahun 2009 - 2011

No	Kode	Nama Perusahaan	Dewan Direksi		
			2009	2010	2011
1	AGRO	Bank Agroniaga	4	4	4
2	BACA	Bank Capital Indonesia	4	4	4
3	BAEK	Bank Ekonomi Raharja	5	5	6
4	BBCA	Bank Central Asia	9	9	10
5	BBNI	Bank Negara Indonesia	9	10	12
6	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan	5	5	5
7	BDMN	Bank Danamon Indonesia	9	11	12
8	BKSW	Bank Kesawan	3	4	7
9	BMRI	Bank Mandiri	11	11	11
10	BNBA	Bank Bumi Arta	3	3	3
11	BNGA	Bank CIMB Niaga	11	12	12
12	BNII	Bank Internasional Indonesia	10	9	9
13	BNLI	Bank Permata	8	10	9
14	BSWD	Bank Swadesi	6	7	5
15	BTPN	Bank Tabungan Pensiun Nasional	8	8	9
16	BVIC	Bank Victoria Internasional	4	3	4
17	INPC	Bank Artha Graha Investama	6	6	6
18	MAYA	Bank Mayapada Internasional	7	6	6
19	MCOR	Bank Windu Kentjana Internasional	4	6	5
20	MEGA	Bank Mega	6	7	7
21	PNBN	Bank Pan Indonesia	11	11	11
22	SDRA	Bank Himpunan Saudara 1906	3	3	4
23	BABP	Bank ICB Bumi Putra	7	7	5
24	BBRI	Bank Rakyat Indonesia	10	10	11

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Lampiran 7

Daftar Presentase Komite Audit Perusahaan Perbankan

Periode Tahun 2009 - 2011

No	Kode	Nama Perusahaan	Persentase (%)		
			2009	2010	2011
1	AGRO	Bank Agroniaga	66,7	66,7	66,7
2	BACA	Bank Capital Indonesia	66,7	66,7	66,7
3	BAEK	Bank Ekonomi Raharja	50,0	50,0	50,0
4	BBCA	Bank Central Asia	75,0	75,0	66,7
5	BBNI	Bank Negara Indonesia	50,0	50,0	50,0
6	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan	66,7	66,7	66,7
7	BDMN	Bank Danamon Indonesia	33,3	33,3	33,3
8	BKSW	Bank Kesawan	66,7	50,0	66,7
9	BMRI	Bank Mandiri	50,0	66,7	100,0
10	BNBA	Bank Bumi Arta	33,3	33,3	66,7
11	BNGA	Bank CIMB Niaga	57,1	50,0	50,0
12	BNII	Bank Internasional Indonesia	50,0	50,0	40,0
13	BNLI	Bank Permata	50,0	50,0	50,0
14	BSWD	Bank Swadesi	60,0	66,7	66,7
15	BTPN	Bank Tabungan Pensiun Nasional	60,0	40,0	60,0
16	BVIC	Bank Victoria Internasional	66,7	66,7	60,0
17	INPC	Bank Artha Graha Investama	66,7	50,0	50,0
18	MAYA	Bank Mayapada Internasional	66,7	66,7	66,7
19	MCOR	Bank Windu Kentjana Internasional	50,0	75,0	75,0
20	MEGA	Bank Mega	33,3	66,7	66,7
21	PNBN	Bank Pan Indonesia	66,7	66,7	66,7
22	SDRA	Bank Himpunan Saudara 1906	66,7	66,7	66,7
23	BABP	Bank ICB Bumi Putra	75,0	66,7	66,7
24	BBRI	Bank Rakyat Indonesia	60,0	60,0	60,0

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Lampiran 8

Daftar Pemegang Saham PT Bank Agroniaga Tahun 2009 - 2011

No	KODE	AGRO	Bank	Agroniaga	
			2009	2010	2011
	Kepemilikan Saham		2009	2010	2011
1	PT Bank Rakyat Indonesia		0	0	79,78
2	Dana Pensiun Perkebunan		96,73	96,75	14
3	publik < 5%		3,27	3,25	6,22
	Total (%)		100	100	100
	Kepemilikan		2009	2010	2011
	Institusional		96,73	96,75	93,78
	manajerial		0	0	0

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Daftar Pemegang Saham PT Bank ICB Bumi Putra Tahun 2009 - 2011

No	KODE	BABP	Bank	Bank ICB Bumi Putra	
			2009	2010	2011
	Kepemilikan Saham		2009	2010	2011
1	ICB Financial Group Holding AG Swiss		67,07	69,99	69,9
2	AJB Bumiputera 1912		5,99	5,46	5,46
3	SGBT		0	7,29	11,41
4	Publik < 5%		26,94	17,26	13,23
	Total (%)		100	100	100
	Kepemilikan		2009	2010	2011
	Institusional		73,06	82,71	86,77
	manajerial		0	0	0

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Daftar Pemegang Saham PT Bank Capital Indonesia Tahun 2009 - 2011

No	KODE	BACA	Bank	Bank Capital Indonesia	
			2009	2010	2011
	Kepemilikan Saham		2009	2010	2011
1	Danny Nugroho* (komisaris)		21,7	0	4,87
2	Mount 8 Holding offshore LTD		0	19,86	9,93
3	UOB Kay Hlan PTE		0	16,83	16,83
4	Inigo Investment LTD		15,44	15,44	15,44
5	Zen Gem Investments Limited		14,34	14,34	14,34

Lanjutan Daftar Pemegang Saham PT Bank Capital Indonesia Tahun 2009 - 2011

No	KODE	BACA	Bank Capital Indonesia	
			2009	2010
	Kepemilikan Saham			
6	TFI (X)-TRA Ordinary Limited	11,86	11,21	0
7	1st Financial Company Limited	11,47	0	0
8	Credit Suisse Singapore	8,26	0	0
9	Publik	16,93	22,32	38,59
	Total (%)	100	100	100
	Kepemilikan	2009	2010	2011
	Institusional	61,37	77,68	56,54
	manajerial	21,7	0	4,87

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Daftar Pemegang Saham PT Bank Ekonomi Raharja Tahun 2009 - 2011

No	KODE	BAEK	Bank	Bank Ekonomi Raharja	
				2009	2010
	Kepemilikan Saham				
1	HSBC Asia Pasific Holding (UK) Limited		98,96	98,96	98,94
2	PT Surya Sakti Investment		1	1	1
3	Masyarakat		0,04	0,04	0,06
	Total (%)		100	100	100
	Kepemilikan		2009	2010	2011
	Institusional		98,96	98,96	98,94
	manajerial		0	0	0

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Daftar Pemegang Saham PT Bank Central Asia Tahun 2009 - 2011

No	KODE	BBCA	Bank	Bank Central Asia	
				2009	2010
1	FarIndo Investment (Mauritius) Ltd Qualitate (qq) Sdr Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono		47,15	47,15	47,15
2	Anhtony Salim		1,76	1,76	1,76
3	Direksi				

4	Jhohar emir Setijoso	0,13	0,13	0,11
---	----------------------	------	------	------

Lanjutan Daftar Pemegang Saham PT Bank Central Asia Tahun 2009 - 2011

No	KODE	BBCA	Bank Central Asia	
		2009	2010	2011
	Kepemilikan Saham			
5	Anthony Brent Elam	0,04	0,04	0,04
6	Jahja Setiaatmaja	0,04	0,04	0,04
7	Subur Tan	0,03	0,03	0,02
8	Dhalia Mansor Budiman	0,02	0,03	0,03
9	Suwignyo Budiman	0,02	0,02	0,03
10	Erwan Yuris Ang	0	0	0,00
11	Henry Koenaefi	0	0	0,00
12	Publik	49,62	49,62	49,91
13	Treasury stock	1,18	1,18	1,18
	Total (%)	100	100	100
	Kepemilikan	2009	2010	2011
	Institusional	47,15	47,15	47,15
	manajerial	0,28	0,28	0,28

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Daftar Pemegang Saham PT Bank Negara Indonesia Tahun 2009 - 2011

No	KODE	BBNI	Bank	Bank Negara Indonesia	
			2009	2010	2011
	Kepemilikan Saham				
1	Pemerintah		76,36	60	60
2	perseroan terbatas		10,21	14,59	14,59
3	badan usaha asing		5,77	22,96	22,96
4	direksi		0,04	0,03	0,03
5	masyarakat		7,62	2,42	2,42
	Total (%)		100	100	100
	Kepemilikan		2009	2010	2011
	Institusional		92,34	97,55	97,55
	manajerial		0,04	0,03	0,03

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Daftar Pemegang Saham PT Bank Nusantara Parahyangan Tahun 2009 - 2011

No	KODE	BBNP	Bank	Bank Nusantara Parahyangan	
				2009	2010
	Kepemilikan Saham				
1	ACOM CO LTD		55,68	60,31	16,31
2	The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD		20	15,2	15,2
3	PT Hermawan Ladang Artta		7,5	9,3	9,3
4	PT Hermawan Sentral Investama		7,5	5,7	5,7
5	Lainnya < 5%		9,32	9,49	9,49
	Total (%)		100	100	100
	Kepemilikan		2009	2010	2011
	Institusional		90,68	90,51	90,51
	manajerial		0	0	0

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Daftar Pemegang Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tahun 2009 - 2011

No	KODE	BBRI	Bank	Bank Rakyat Indonesia	
				2009	2010
	Kepemilikan Saham				
1	Pemerintah		56,77	56,75	56,75
2	perorangan dalam negeri		0,77	0,84	0,63
3	karyawan		0,56	0,46	0,42
4	pemerintah daerah		0,00	0	0,00
5	institusi		5,25	5,14	5,9
6	perorangan asing		0,00	0	0,00
7	badan usaha asing		36,38	36,81	36,3
	Total (%)		100	100	100
	Kepemilikan		2009	2010	2011
	Institusional		98,4	98,7	98,95
	manajerial		0,56	0,46	0,42

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Daftar Pemegang Saham PT Bank Danamon Indonesia Tahun 2009 - 2011

No	KODE	BDMN	Bank	Bank Danamon Indonesia	
				2009	2010
	Kepemilikan Saham				
1	Asia Financial Pte Ltd		67,63	67,42	67,37
2	Masyarakat		32,21	31,84	32,63
3	komisaris dan direksi		0,16	0,16	0
	Total (%)		100	100	100
	Kepemilikan				
	Institusional		67,63	67,42	67,37
	manajerial		0,16	0,16	0

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Daftar Pemegang Saham PT Bank Kesawan Tahun 2009 - 2011

No	KODE	BKS	Bank	Bank Kesawan	
				2009	2010
	Kepemilikan Saham				
1	Qatar National Bank		0	0	69,59
2	PT Adhi Tirta Mustika		51,22	51,23	21,83
3	PT Malltomo		18,37	18,37	0
4	PT Kapita Sekurindo		6,49	0,54	0,03
5	lain-lain <5%		23,92	29,86	8,55
	Total		100	100	100
	Kepemilikan				
	Institusional		76,08	70,14	91,45
	manajerial		0	0	0

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Daftar Pemegang Saham PT Bank Bumi Arta Tahun 2009 - 2011

No	KODE	BNBA	Bank	Bank Bumi Arta	
				2009	2010
	Kepemilikan Saham				
1	PT Surya Husada Investment		45,45	45,45	45,45
2	PT Dana Graha Agung		27,27	27,27	27,27
3	PT Budiman		18,18	18,18	18,18
4	Masyarakat <5%		9,1	9,1	9,1
	Total		100	100	100
	Kepemilikan				
	Institusional		90,9	90,9	91,9
	manajerial		0	0	0

Daftar Pemegang Saham PT Bank CIMB Niaga Tahun 2009 - 2011

No	KODE	BNGA	Bank	Bank CIMB Niaga	
			2009	2010	2011
		Kepemilikan Saham			
1		CIMB Group Bhd, Malaysia	77,24	96,91	96,92
2		Santubong Ventures Sdn Bhd, Malaysia	16,64	0	0
3		PT Commerce Kapital	0	1,02	1,02
4		masyarakat <5%	6,12	2,07	2,06
		Total	100	100	100
		Kepemilikan	2009	2010	2011
		Institusional	93,88	97,93	97,94
		manajerial	0	0	0

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Daftar Pemegang Saham PT Bank Internasional Indonesia Tahun 2009 - 2011

No	KODE	BNII	Bank	Bank Internasional Indonesia	
			2009	2010	2011
		Kepemilikan Saham			
1		Sorak Financial Holdings Pte Ltd	54,33	54,33	54,33
2		Mayban Offshore Corporate Service (Labuan) Sdn. Bhd.	43,19	43,05	42,69
3		Publik	2,48	2,62	2,71
4		direksi	0,0003	0,0003	0,0003
		Total	100	100	100
		Kepemilikan	2009	2010	2011
		Institusional	97,52	97,38	97,02
		manajerial	0,0003	0,0003	0,0003

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Daftar Pemegang Saham PT Bank Permata Tahun 2009 - 2011

No	KODE	BNLI	Bank	Bank Permata	
			2009	2010	2011
		Kepemilikan Saham			
1		PT Astra International Tbk	44,5	44,5	44,5
2		Standart Chartered Bank	44,5	44,5	44,5
3		Publik	11	11	11
		Total	100	100	100
		Kepemilikan	2009	2010	2011
		Institusional	89	89	89
		manajerial	0	0	0

Daftar Pemegang Saham PT Bank Swadesi Tahun 2009 - 2011

No	KODE	BSWD	Bank	Bank Swadesi	
			2009	2010	2011
		Kepemilikan Saham	2009	2010	2011
1		Bank Of India	76	76	76
2		PT Panca Mantra jaya	17,12	17,09	17,12
3		Tn Prakash Rupchand Chugani* komisaris	1,61	1,61	1,61
4		Publik <5%	5,27	5,3	5,27
		Total	100	100	100
		Kepemilikan	2009	2010	2011
		Institusional	93,12	93,09	93,12
		manajerial	1,61	1,61	1,61

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Daftar Pemegang Saham PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tahun 2009 - 2011

No	KODE	BTPN	Bank	Bank Tabungan Pensiun Nasional	
			2009	2010	2011
		Kepemilikan Saham	2009	2010	2011
1		TPG Nusantara Sari	71,61	59,68	59,68
2		Direksi	0,82	0,84	0,86
3		Komisaris	0	0,01	0,004
4		publik	27,57	39,47	39,46
		Total	100	100	100
		Kepemilikan	2009	2010	2011
		Institusional	71,61	59,68	59,68
		manajerial	0,82	0,85	0,86

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Daftar Pemegang Saham PT Bank Victoria Internasioanl Tahun 2009 - 2011

No	KODE	BVIC	Bank	Bank Victoria Internasional	
			2009	2010	2011
		Kepemilikan Saham	2009	2010	2011
1		PT Victoria Sekuritas	43,73	38,01	35,16
2		Suzanna tanojo * komisaris	17,14	16,1	13,47
3		PT Suryayudha Investindo Cipta	7,09	6,66	6,4
4		PT Nata Patindo	4,34	4,07	3,36
5		Emirates Asset Management			9,05
6		publik	27,7	35,16	32,56

	Total		100	100	100
--	-------	--	-----	-----	-----

Lanjutan Daftar Pemegang Saham PT Bank Victoria Internasioanl Tahun 2009 - 2011

No	KODE	BVIC	Bank Victoria Internasional		
			2009	2010	2011
	Kepemilikan Saham				
	Kepemilikan	2009	2010	2011	
	Institusional	55,16	48,74	53,97	
	manajerial	17,14	16,1	13,47	

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Daftar Pemegang Saham PT Bank Artha Graha Investama Tahun 2009 - 2011

No	KODE	INPC	Bank	Bank Artha Graha Investama	
				2009	2010
	Kepemilikan Saham				
1	PT Cerana Arthaputra		15,42	15,42	15,42
2	PT Arthamulia Sentosajaya		9,63	9,63	9,63
3	PT Pirus Platinum Murni		9,63	9,63	9,63
4	PT Puspita Bisnisपुरi		9,63	9,63	9,63
5	PT Karya Nusantara Permai		8,31	8,31	8,31
6	Publik		47,38	47,38	47,38
	Total		100	100	100
	Kepemilikan		2009	2010	2011
	Institusional		52,62	52,62	52,62
	manajerial		0	0	0

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Daftar Pemegang Saham PT Bank Maya Pada Tahun 2009 - 2011

No	KODE	MAYA	Bank	Bank Maya Pada	
				2009	2010
	Kepemilikan Saham				
1	Bank Mayapada Karunia		28,4	25,31	25,31
2	Bank Mayapada Kasih		0,26	3,21	3,21
3	Summertime LTd		24,43	24,43	24,43
4	CGMI 1 Client Segregated Secs		23,03	19,2	19,2
5	Briliant Bazaar Ltd		7,76	8,36	8,36
6	Dubai Vertures Limited		7,68	0	0

7	CGML IPB Customer Collateral Acc	0	3,83	3,83
8	Wingfield Global Trading Ptte Ltd	0	7,68	7,68

Lanjutan Daftar Pemegang Saham PT Bank Maya Pada Tahun 2009 - 2011

No	KODE	MAYA	Bank Maya Pada	
			2009	2010
	Kepemilikan Saham			
9	Publik	8,44	7,98	7,98
	Total	100	100	100
	Kepemilikan			
	Institusional	91,56	92,02	92,02
	manajerial	0	0	0

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Daftar Pemegang Saham PT Bank Windu Kentjana Internasional Tahun 2009 - 2011

No	KODE	MCOR	Bank	Bank Windu Kentjana Internasional	
				2009	2010
	Kepemilikan Saham				
1	Johnny wiraatmadja (Bank Panin)		45,92	48,01	67,06
2	PT Mitra Wadah Kencana		20,3	14,82	14,82
3	PT Blue Cross Indonesia		14,91	4,28	4,28
4	PT BCA Finance		7,11	0	0
5	Publik		11,3	31,19	8,77
6	komisaris		0,46	1,7	5,07
	Total		100	100	100
	Kepemilikan				
	Institusional		88,24	67,11	95,72
	manajerial		0,46	1,7	5,07

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Daftar Pemegang Saham PT Bank Mega Tahun 2009 - 2011

No	KODE	MEGA	Bank	Bank Mega	
				2009	2010
	Kepemilikan Saham				
1	PT Mega Corpora (Chairul Tanjung)		57,82	57,82	57,82
2	publik		42,18	42,18	42,18
	Total		100	100	100
	Kepemilikan				
	Institusional		57,82	57,82	57,82
	manajerial		0	0	0

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Daftar Pemegang Saham PT Bank Panin Indonesia Tahun 2009 - 2011

No	KODE	PNBN	Bank	Bank Panin Indonesia	
			2009	2010	2011
		Kepemilikan Saham			
1		PT Panin Financial Tbk	45,92	44,68	45,46
2		Votrait no 1103 pty Limited	38,48	38,82	38,82
3		lainya <5%	15,6	16,5	15,72
		Total	100	100	100
		Kepemilikan	2009	2010	2011
		Institusional	84,4	83,5	84,28
		manajerial	0	0	0

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Daftar Pemegang Saham PT Bank Mandiri Tahun 2009 - 2011

No	KODE	BMRI	Bank	Bank Mandiri	
			2009	2010	2011
		Kepemilikan Saham			
1		Pemerintah	66,76	66,68	60
2		perorangan indonesia	0,93	0,73	1,25
3		pegawai	0,6	0,59	0,54
4		koperasi	0,00	0,00	0,00
5		yayasan	0,04	0,04	0,06
6		dana pensiun	0,90	0,81	1,09
7		asuransi	1,33	1,21	1,81
8		perseroan terbatas	1,42	1,5	1,52
9		Reksadana	2,94	1,76	3,65
10		perorangan asing	0,03	0,01	0,01
11		badan usaha asing	25,07	26,67	30,07
		Total	100	100	100
		Kepemilikan	2009	2010	2011
		Institusional	98,46	96,91	94,55
		manajerial	0,6	0,59	0,54

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Daftar Pemegang Saham PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tahun 2009 - 2011

No	KODE	SDRA	Bank	Bank Himpunan Saudara 1906	
			2009	2010	2011
		Kepemilikan Saham			

1	Ir H Arifin Panigoro	49,89	52,92	52,92
2	PT Medco Intidnamika	10,4	11,03	11,03

**Lanjutan Daftar Pemegang Saham PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tahun
2009 - 2011**

No	KODE	SDRA	Bank Himpunan Saudara 1906	
			2009	2010
	Kepemilikan Saham		2010	2011
3	publik	39,6	35,3	36,05
4	manajerial	1	0,75	0
	Total	100	100	100
	Kepemilikan		2010	2011
	Institusional	10,4	11,03	11,03
	manajerial	1	0,75	0



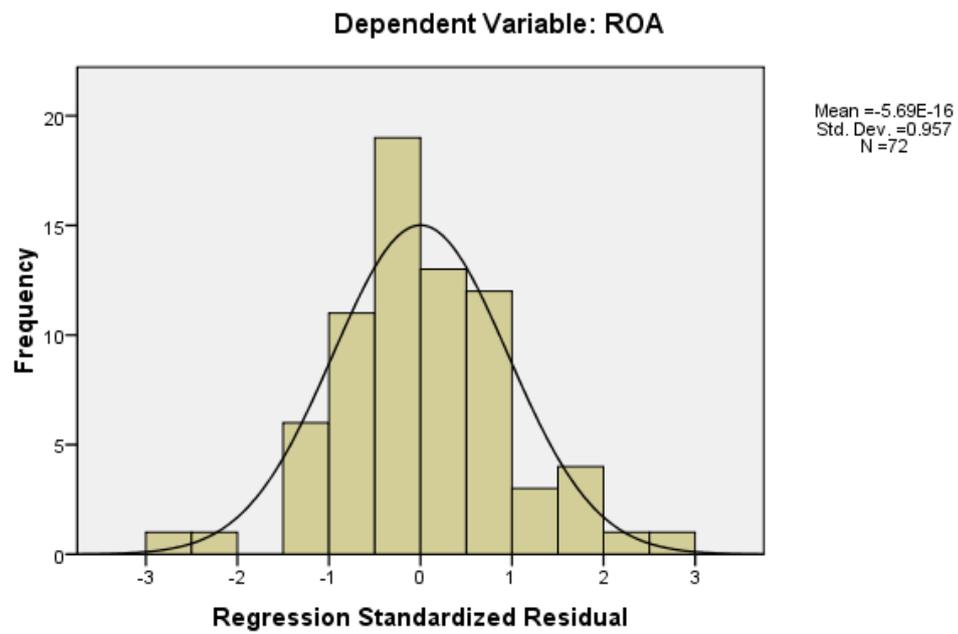
Lampiran 9

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	72	6.15	-1.70	4.45	1.8096	1.15898
INST	72	88.56	10.40	98.96	78.3621	22.09354
MANJ	72	21.70	.00	21.70	1.5264	4.15826
KOMS	72	7.00	2.00	9.00	5.0972	1.91480
INDP	72	66.67	33.33	100.00	55.4544	11.26092
DIRK	72	9.00	3.00	12.00	7.0972	2.86877
AUDT	72	66.67	33.33	100.00	59.2439	12.43767
Valid N (listwise)	72					

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013



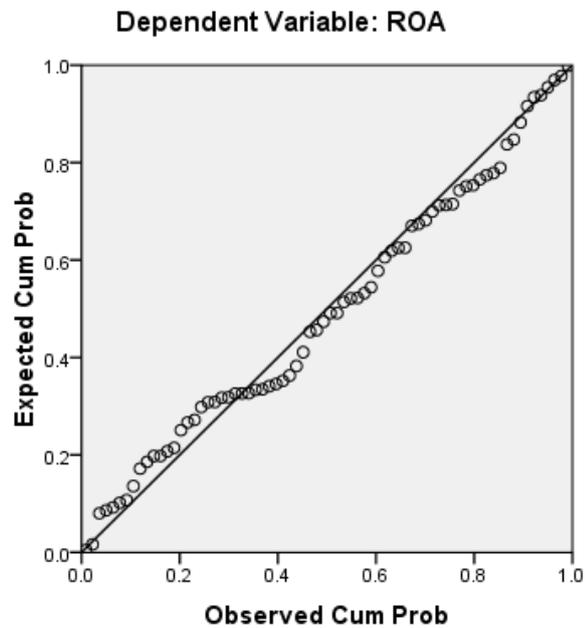
Lampiran 10**Histogram**

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013



Lampiran 11

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

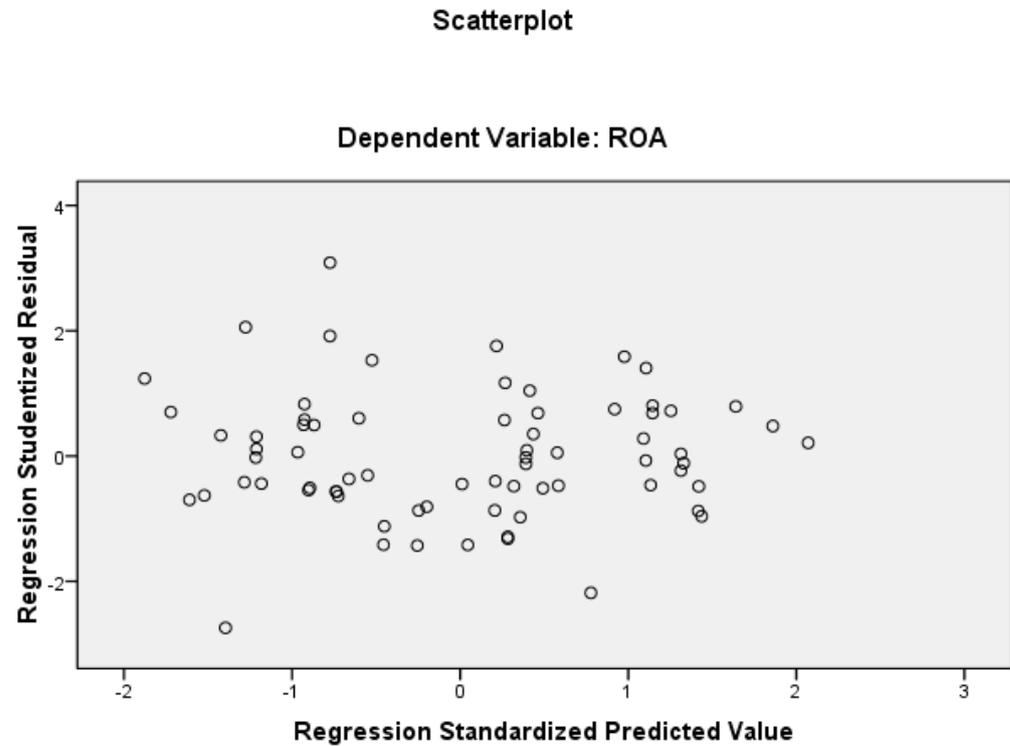
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.99311312
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.054
Kolmogorov-Smirnov Z		.624
Asymp. Sig. (2-tailed)		.831

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Lampiran 12



Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.570	.667		-.854	.396
INST	.003	.004	.105	.837	.406
MANJ	-.030	.019	-.202	-1.595	.116
KOMS	.054	.062	.165	.874	.385
INDP	.011	.007	.203	1.673	.099
DIRK	-.039	.040	-.181	-.977	.332
AUDT	.009	.006	.177	1.446	.153

a. Dependent Variable: abresid

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Lampiran 13

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.516 ^a	.266	.198	1.03794	1.889

a. Predictors: (Constant), AUDT, INDP, INST, MANJ, DIRK, KOMS

b. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity	Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.536	1.121		2.262	.027		
	INST	-.013	.006	-.256	-2.241	.028	.867	1.154
	MANJ	-.002	.032	-.008	-.068	.946	.853	1.172
	KOMS	-.062	.103	-.102	-.597	.552	.387	2.585
	INDP	-.008	.011	-.078	-.706	.483	.930	1.075
	DIRK	.224	.068	.556	3.310	.002	.401	2.495
	AUDT	-.009	.010	-.092	-.826	.412	.918	1.090

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.516 ^a	.266	.198	1.03794

b. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Lampiran 14

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	25.343	6	4.224	3.921	.002 ^a
	Residual	70.025	65	1.077		
	Total	95.369	71			

a. Predictors: (Constant), AUDT, INDP, INST, MANJ, DIRK, KOMS

b. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013

Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.536	1.121		2.262	.027
	INST	-.013	.006	-.256	-2.241	.028
	MANJ	-.002	.032	-.008	-.068	.946
	KOMS	-.062	.103	-.102	-.597	.552
	INDP	-.008	.011	-.078	-.706	.483
	DIRK	.224	.068	.556	3.310	.002
	AUDT	-.009	.010	-.092	-.826	.412

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013